KADIN NEWS

Edisi: Februari 2026

KADIN INDONESIA

Ketum Kadin:
AS Penting Sebagai Mitra Dagang Utama

Anindya Bakrie: ABAC Meeting I 2026 Jadi Momentum Awal Integrasi kawasan Asia - Pasifik Guna Meningkatkan Arus Investasi dan Perdagangan

Sinyal Kuat Kebangkitan Industri Galangan Kapal Dalam Negeri

Kadin Teken Kerja Sama dengan US-ABC, Bidik Lonjakan Ekspor Alas Kaki ke AS

APF Canada Hadirkan Pemimpin APEC di Jakarta untuk Perkuat Keuangan Digital UMKM Perempuan

Kata Pengantar

ART, Menandai Era Baru Hubungan Ekonomi Indonesia dan AS

Oleh: Anindya Novyan Bakrie

Kunjungan saya ke Amerika Serikat bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Februari 2026 merupakan sebuah momentum penting yang menandai fase baru hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Di Washington DC, kami menyaksikan secara langsung bagaimana Indonesia tampil dengan kepercayaan diri baru sebagai negara dengan ekonomi yang stabil, terbuka, dan siap menjadi mitra strategis dalam ekonomi global. Dalam suasana dunia yang semakin dipengaruhi rivalitas geopolitik dan proteksionisme perdagangan, diplomasi ekonomi menjadi instrumen yang semakin menentukan masa depan sebuah bangsa.

Puncak dari kunjungan tersebut adalah penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada 19 Februari 2026. Bagi saya, kesepakatan ini bukan sekadar perjanjian perdagangan biasa. Ia adalah tonggak bersejarah yang membuka babak baru hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. ART, menandai era baru hubungan ekonomi Indonesia dan AS. Jika selama ini hubungan kedua negara lebih banyak bertumpu pada perdagangan barang, maka ART memperluasnya menjadi kemitraan ekonomi yang lebih strategis, mencakup investasi, teknologi, integrasi rantai pasok, hingga penguatan industri masa depan.

Selama beberapa dekade terakhir, AS merupakan salah satu pasar ekspor terpenting bagi Indonesia. Berbagai produk nasional seperti tekstil, alas kaki, furnitur, komoditas perkebunan, hingga komponen elektronik telah lama memiliki posisi kuat di pasar Amerika. Bahkan dalam hubungan perdagangan bilateral tersebut, Indonesia selama ini menikmati surplus perdagangan yang cukup besar dengan Amerika Serikat.

Surplus perdagangan Indonesia dengan AS acap menempati peringkat pertama, posisinya bergantian dengan India. Fakta ini menunjukkan bahwa produk Indonesia memiliki daya saing yang baik di pasar global, khususnya di pasar Amerika yang dikenal sangat kompetitif. Karena itu, setiap perubahan dalam kebijakan tarif dan akses pasar selalu memiliki implikasi besar bagi pelaku usaha nasional.

Dalam konteks tersebut, keberhasilan Indonesia menegosiasikan tarif impor rata-rata sebesar 15% dalam ART patut diapresiasi. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan skenario sebelumnya yang sempat menyebut angka 19%, bahkan ada potensi ancaman tarif hingga 32% dalam proses perundingan awal.

Dengan tarif rata-rata 15%, posisi produk Indonesia di pasar Amerika tetap kompetitif dibandingkan banyak negara lain. Ini memberikan kepastian yang sangat penting bagi dunia usaha dalam menyusun strategi ekspor jangka panjang.

Yang lebih menggembirakan lagi, dalam kesepakatan tersebut terdapat 1.819 pos tarif produk unggulan Indonesia yang memperoleh tarif 0% saat masuk ke pasar AS . Produk-produk tersebut mencakup sektor-sektor penting seperti minyak sawit, kopi, kakao, karet, komponen elektronik, serta semikonduktor. Bagi saya, ini adalah peluang besar bagi industri nasional untuk memperluas ekspor sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Selain itu, produk tekstil dan apparel Indonesia juga memperoleh tarif 0%, walaupun dengan mekanisme kuota tertentu. Ini tetap merupakan kabar baik bagi industri tekstil nasional yang selama ini menjadi salah satu sektor padat karya terbesar di Indonesia.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) tidak hanya berperan dalam ekspor, tetapi juga menjadi penopang utama lapangan kerja bagi jutaan pekerja Indonesia. Dengan akses pasar yang lebih baik ke Amerika Serikat, sektor ini berpotensi tumbuh lebih kuat.

Sebagai bagian dari prinsip resiprositas dalam perdagangan internasional, Indonesia juga sepakat untuk menghapus tarif terhadap sekitar 99% barang impor dari AS. Langkah ini merupakan bagian dari keseimbangan dalam perjanjian perdagangan bilateral.

Namun saya memandang kebijakan tersebut secara lebih luas. Dalam banyak kasus, penghapusan tarif untuk produk tertentu justru dapat meningkatkan efisiensi ekonomi domestik.

Sebagai contoh, untuk produk pertanian AS, bea masuk nol dapat menghasilkan harga yang lebih kompetitif bagi konsumen Indonesia. Harga pangan yang lebih efisien dapat membantu menjaga stabilitas inflasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, akses terhadap bahan baku dan barang modal yang lebih murah juga dapat membantu industri domestik meningkatkan produktivitas.

Di Washington DC, kami juga mengikuti berbagai forum bisnis bersama US Chamber of Commerce, US-ASEAN Business Council, dan US-Indonesia Society. Dalam forum tersebut Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang stabil, aman, dan terbuka bagi investasi.

Pesan tersebut sangat penting dalam dunia bisnis global. Investor selalu mencari negara yang memiliki kepastian hukum, stabilitas politik, serta arah kebijakan ekonomi yang jelas.

Presiden Prabowo juga bertemu dengan 12 investor besar AS yang secara kolektif mengelola aset sekitar US$15-16 triliun. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa minat investor global terhadap Indonesia semakin besar.

Selain itu, selama kunjungan tersebut juga ditandatangani 11 nota kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat dengan nilai sekitar US$38,4 miliar. Kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor strategis seperti mineral kritis, energi, agribisnis, tekstil, furnitur, hingga semikonduktor. Ini menunjukkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia-Amerika Serikat kini bergerak menuju fase yang lebih dalam dan lebih luas.

Hubungan ini tidak lagi sekadar perdagangan komoditas, tetapi juga mencakup investasi industri, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas produksi nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, kemitraan semacam ini menjadi semakin penting bagi Indonesia.

Bagi dunia usaha Indonesia, ART membuka peluang besar untuk memperluas akses pasar, meningkatkan ekspor, dan memperkuat kemitraan internasional. Namun peluang ini juga menuntut kesiapan industri nasional untuk meningkatkan daya saing, kualitas produk, serta inovasi teknologi.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi harus menjadi basis produksi bernilai tambah yang kuat. Dalam perspektif yang lebih luas, ART juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global, khususnya dalam sektor industri masa depan seperti semikonduktor, teknologi digital, dan manufaktur maju.

Kerja sama yang lebih erat dengan Amerika Serikat juga membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan ekonomi digital. Jika dimanfaatkan dengan baik, kerja sama teknologi ini dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju industri berbasis inovasi.

Saya meyakini bahwa penandatanganan ART tidak akan menghilangkan keunggulan Indonesia dalam hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat. Sebaliknya, dengan akses pasar yang lebih luas dan tarif yang lebih kompetitif, neraca perdagangan Indonesia berpeluang tetap mencatat surplus.

Lebih dari itu, industri padat karya seperti TPT berpotensi berkembang lebih kuat, memperluas ekspor, serta menjaga jutaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dalam jangka panjang, hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Amerika Serikat juga membuka peluang kerja sama energi dan teknologi yang lebih luas. Hal ini berpotensi membantu Indonesia melakukan diversifikasi sumber energi sehingga ketergantungan terhadap pasokan migas dari Afrika dan Timur Tengah dapat secara bertahap dikurangi.

Pada akhirnya, saya melihat ART bukan hanya sebuah perjanjian perdagangan. Ia adalah fondasi bagi era baru hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat—sebuah hubungan yang lebih strategis, lebih modern, dan lebih berorientasi pada pertumbuhan bersama.

DAFTAR ISI

Tanggapi Agreement on Reciprocal Trade RI-AS, Ketum Kadin: Tarif 19 Persen Sangat Kompetitif 6

Kadin Teken Kerja Sama dengan US-ABC, Bidik Lonjakan Ekspor Alas Kaki ke AS 11

Kunjungi Georgetown University, Anindya Bakrie Targetkan Fortune 500 Perusahaan dari Indonesia 12

James Riady: Perjanjian Perdagangan Timbal-Balik AS–RI, Momen Bersejarah dan Transformasi Ekonomi 13

Sinyal Kuat Kebangkitan Industri Galangan Kapal Dalam Negeri 14

Anindya Bakrie: ABAC Meeting I 2026 Jadi Momentum Awal Integrasi kawasan Asia - Pasifik Guna Meningkatkan Arus Investasi dan Perdagangan 21

APF Canada Hadirkan Pemimpin APEC di Jakarta untuk Perkuat Keuangan Digital UMKM Perempuan 30

Kadin Provinsi Sumut Resmikan 3 SPPG MBG, Dorong Ekosistem Usaha dan Lapangan Kerja Baru 32

Kadin Indonesia dan Perum Perumnas Menandatangani Nota Kesepahaman Dukung Program Perumahan Nasional 33

James Riady: Tidak Cukup Alasan untuk Tidak Optimistis Memasuki Tahun 2026 35

DAFTAR ISI

Kadin dan Kemlu Gelar Diplomatic Gatherings, Perkuat Promosi Perdagangan dan Investasi 38

Anindya Bakrie Tegaskan Pertumbuhan Hijau sebagai Motor Investasi, Transisi Energi, dan Daya Saing Global 39

Ketum Kadin: Perdagangan Indonesia-Australia Berpeluang Naik Tiga Kali Lipat 41

Devi Rachmawati: CEPA Indonesia–Kanada Bakal Perkuat Integrasi Sistem Pangan 42

Makkah Halal Forum 2026:
Titi Khoiriah Tegaskan peran strategis Indonesia dalam Ekosistem Halal Global 44

Pengurus Kadin Jatim 2025-2030 Resmi Dilantik, Anindya Bakrie Tekankan Semangat Indonesia Incorporated dalam Industri Manufaktur dan Agroindustri 45

Pelantikan Pengurus Kadin DIY, Anindya Bakrie Ungkap Kekuatan Ekonomi DIY Bertumpu pada Manusia dan Budaya 47

Kadin Kalsel Gelar Pembinaan Kepatuhan Badan Usaha terhadap Bisnis dan HAM, Dukung Ekosistem yang Transparan 48

Kadin Lakukan Ekspor Perdana Arang Kelapa ke Tianjin Senilai Rp200 Miliar 49

Erwin Aksa Apresiasi Kadin Sultra Bangun SPPG MBG hingga Dorong Hilirisasi Nikel Berkelanjutan 50

Tanggapi Agreement on Reciprocal Trade RI-AS, Ketum Kadin: Tarif 19 Persen Sangat Kompetitif

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perjanjian perdagangan di Washington, D.C., Amerika Serikat, Kamis (19/02/2026). Penandatanganan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan strategis.

Washington DC – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menanggapi langkah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat hubungan dagang dan investasi dengan Amerika Serikat (AS), termasuk melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani bersama Presiden AS Donald Trump.

Anindya, yang akrab disapa Anin, menilai kesepakatan tersebut memberikan sinyal positif bagi dunia usaha kedua negara, khususnya terkait skema tarif yang dinilai kompetitif.

“Harapan Kadin dan yang kami dengar, tarif 19 persen itu sudah sangat kompetitif. Apalagi beberapa produk-produk ekspor kita yang menggunakan komponen dari Amerika (Serikat) bisa bahkan turun sampai dibebaskan dari tarif. Nah ini sangat menarik, tapi harus dipelajari detailnya,” ujar Anin di Washington DC, AS, Rabu (18/02/2026) waktu setempat.

Anin menegaskan bahwa pelaku usaha perlu mencermati secara rinci ketentuan teknis dalam ART agar manfaatnya dapat dioptimalkan, terutama bagi sektor manufaktur dan industri bernilai tambah.

Menurut Anin, sejumlah asosiasi industri juga mulai menjajaki peluang kolaborasi konkret dengan mitra di AS sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut.

“Tadi saya bicara dengan salah satu pimpinan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) yang ada di sini. Mereka ingin bicara dengan counterpart-nya supaya melihat apa yang bisa diimpor dari Amerika (Serikat), tapi nantinya diolah dan dikirim balik ke Amerika (Serikat) dengan ada nilai tambah,” kata Anin.

Skema ini dinilai Anin sejalan dengan agenda hilirisasi dan peningkatan daya saing ekspor nasional.

“Kalau memang permintaannya dari Amerika (Serikat) tentu masuk akal, apalagi kalau tarifnya nol,” tambah Anin

Tanggapan soal Tarif Impor AS 15 Persen

Sementara itu, menanggapi isu kemungkinan tarif impor Amerika Serikat (AS) sebesar 15 persen berkaitan dengan keputusan Mahkamah Agung AS, Anin menekankan pentingnya posisi AS sebagai mitra dagang utama Indonesia.

“Kalau kita bicara mengenai Amerika Serikat, perlu dicatat bahwa Amerika (Serikat) itu adalah mitra berdagang kita yang nomor dua terbesar. Jumlahnya sekitar 40 miliar dolar AS. Jadi sangat penting sekali, terutama untuk garmen, tekstil, alas kaki, sampai furniture dan elektronik,” ujar Anin.

Anin menyampaikan, terdapat lebih 1.000 jenis produk yang memperoleh insentif tarif hingga 0% untuk ekspor ke AS, termasuk komoditas kakao, kopi, hingga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

“Tujuannya itu untuk memastikan bahwa produk-produk Indonesia bisa masuk ke Amerika (Serikat) dengan tarif sedang mungkin bahkan 0 persen,” jelas Anin.

Terkait keputusan Mahkamah Agung ini, Anin menilai hal tersebut memang sudah sempat diprediksi dan tidak membuat posisi Indonesia menjadi lebih buruk.

“Yang paling penting adalah kita melihat niat baik dari kedua negara sudah terbentuk. Dengan adanya keputusan itu, pihak Amerika (Serikat) tentu akan melakukan pekerjaan rumahnya untuk mengatur peraturan dalam negerinya. Tapi Indonesia saya rasa tidak akan lebih jelek daripada sebelumnya,” ujar Anin.

Anin optimistis perdagangan Indonesia-AS akan tetap memberikan hasil positif. Terlebih, sejumlah komoditas yang diimpor dari AS seperti kedelai, kapas, dan gandum memang dibutuhkan industri dalam negeri.

“Yang penting dari kita adalah harganya terjangkau. Kalau harganya 0 persen, artinya buat konsumen kita tentunya lebih murah,” kata Anin.

Lebih lanjut, menanggapi perubahan kebijakan tarif AS, Anin mengatakan bahwa pelaku usaha nasional justru perlu meningkatkan kapasitas produksi untuk menangkap peluang ekspor.

“Indonesia mesti siap-siap untuk memperluas kapasitas produksinya. Kalau sudah terbuka pasar baik di Amerika (Serikat), juga Eropa, Kanada, dan pada umumnya mereka bicara produk-produk yang sama, bagaimana kita meningkatkan kapasitas produksi sehingga bisa menghasilkan ekspor dan devisa yang lebih,” tegas Anin.

Menurut Anin, dunia usaha harus mulai berpikir ofensif dalam arti memperluas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi baru.

“Bukan hanya defensif dari sisi bertahan, tapi kalau sudah dibuka jalan bagaimana bisa lebih ofensif dalam arti memperluas produksi. Tentunya itu berarti lapangan kerja dan investasi. Itu mesti dipikirkan baik-baik,” tandas Anin.

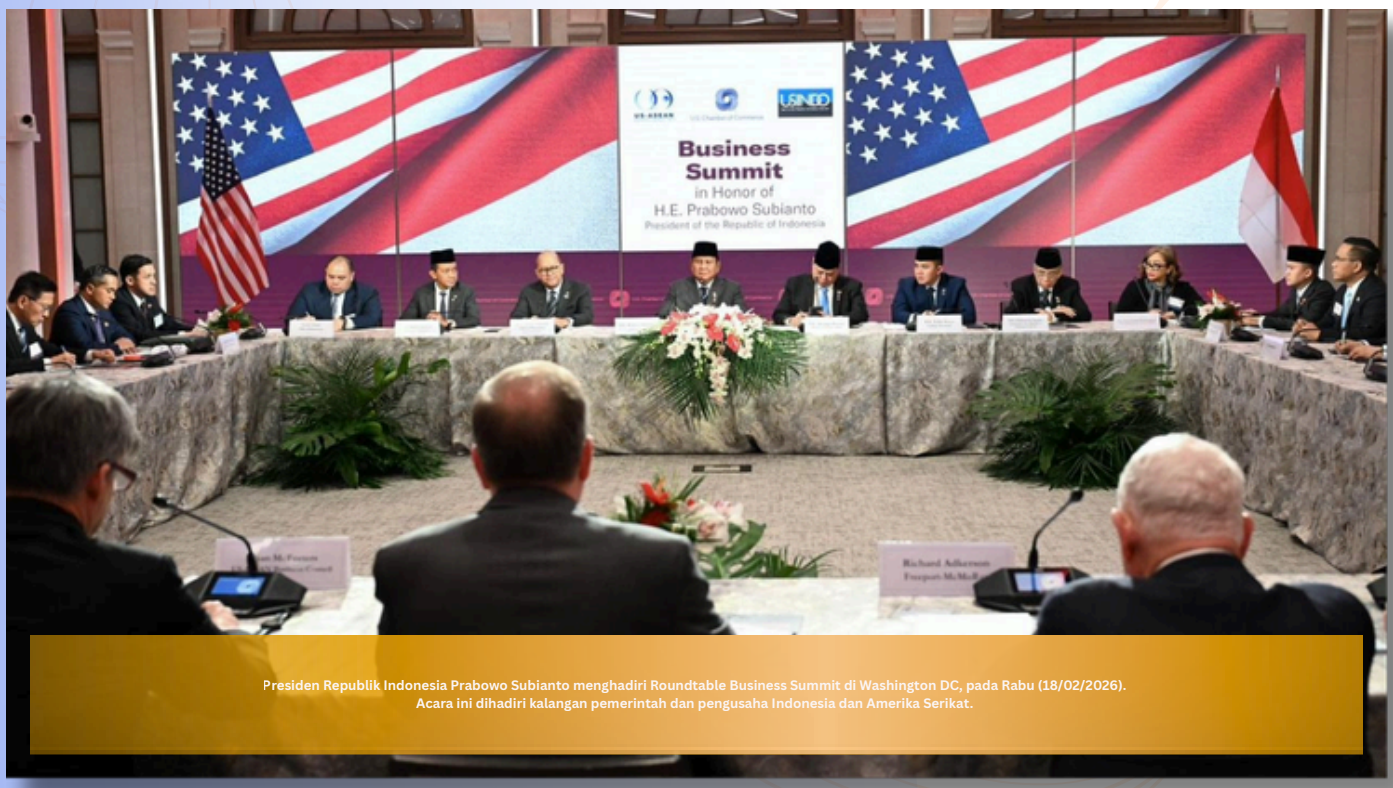

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri Roundtable Business Summit di Washington DC, pada Rabu (18/02/2026).
Acara ini dihadiri kalangan pemerintah dan pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat.

Foto: Tim Media Presiden
(Kiri ke kanan) Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie, WKU Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir, serta WKU Koordinator Bidang Luar Negeri James T. Riady berfoto bersama saat menghadiri Roundtable Business Summit di Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (18/02/2026).

Lebih lanjut, Anin menekankan bahwa Kadin mendukung penuh diplomasi ekonomi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Dalam sambutannya pada sesi roundtable Business Summit in Honor of H.E. Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia bersama US Chamber of Commerce (USCC), US-ASEAN Business Council (USABC) dan US-Indonesia Society (USINDO), Presiden Prabowo menegaskan bahwa perjanjian perdagangan Indonesia-AS memiliki arti penting bagi dunia usaha dan investasi kedua negara.

“Hal ini memberikan sinyal yang jelas bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memilih untuk melanjutkan kerja sama ekonomi yang lebih dalam, akses pasar yang lebih kuat, dan kepastian yang lebih besar bagi dunia bisnis,” kata Presiden Prabowo, dikutip dari laman resmi presidenri.go.id.

Presiden juga menekankan bahwa kepastian merupakan faktor utama dalam menarik investasi. Stabilitas, supremasi hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

“Tidak ada yang ingin berinvestasi dalam situasi atau suasana ketidakpastian, ketidakstabilan, atau bahkan kekacauan. Kita sangat beruntung bahwa Indonesia telah menikmati periode stabilitas dan perdamaian yang relatif cukup panjang,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Duta Besar Republik Indonesia untuk AS Dwisuryo Indroyono Soesilo.

Perkasa Roeslani, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Duta Besar Republik Indonesia untuk AS Dwisuryo Indroyono Soesilo.

Sementara dari Kadin Indonesia, turut hadir Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady, WKUK Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega, WKU Bidang Hilirisasi Kadin Indonesia Tony Wenas yang juga hadir sebagai President Director PT Freeport Indonesia, WKU Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin Indonesia sekaligus CEO Wiraraja Group Akhmad Ma’ruf Maulana.

Penandatanganan MoU

Usai roundtable Business Summit, Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) senilai 38,4 miliar dolar AS antara pelaku usaha Indonesia dan AS dalam acara Gala Iftar Dinner in Honor of H.E. Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia yang diselenggarakan oleh US-ABC.

Dilansir situs resmi presidenri.go.id, adapun daftar nota kesepahaman yang ditandatangani adalah sebagai berikut:

01

Memorandum of Agreement tentang Critical Mineral, ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM **Rosan Perkasa Roeslani** dan President & CEO Freeport-McMoRan **Kathleen Quirk** dan President Director PT Freeport Indonesia **Tony Wenas**;

02

MoU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Haliburton, ditandatangani oleh CEO Pertamina **Simon Mantiri** dan President Director **Haliburton Ankush Balla**;

03

MoU di bidang Agrikultur (Jagung) antara PT. Cargill Indonesia, PT Arena Agro Andalan dan Cargill Inc, ditandatangani oleh Managing Director **Amcham** mewakili Fanny Hosea PT Sorini Agro Asia Corporindo (Cargill Indonesia) **Donna Priadi** dan Director International Government Relations (China & APAC) at Cargill Elizabeth Struse;

04

MoU tentang Cotton antara Busana Apparel Group dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh Chief Marketing Officer Busana Apparell **Manish Virmani** serta Senior Government Relations Director for National Cotton Council **Jeff Kuckkuck**;

05

MoU tentang Cotton antara Daehan Global dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh CEO of Daehan Global **Boo Hyung Lee** dan Senior Government Relations Director for National Cotton Council **Jeff Kuckkuck**;

06

MoU tentang Shredded Worn Clothing antara Asosiasi Garment dan Textile Indonesia, PT Pan Brothers dan Ravel, ditandatangani oleh CEO PT PAN Brothers **Ludijanto Setijo** dan CEO Ravel **Zahlen Titcomb**;

Penandatanganan MoU

07 MoU tentang Furnitur antara ASMINDO (Indonesian Furniture Industry & Handicraft Association) dan Bingaman and Son Lumber, Inc, ditandatangani oleh CEO Vivere Group (ASMINDO) **Dedy Rochimat** dan Director of Exports **Jeremy Roupp**;

08 MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri dan Essence, ditandatangani oleh President Director **Ahmad Maaruf** Maulana dan President Director **Chester Coleman**;

09 MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri (GBI) dan Tynergy Technology Group, ditandatangani oleh Director GBI **Kadafi Yahya Muhamad** dan President Direktur **Yan Purba**;

10 Transnational Free Trade Zone Friendship antara Galang Bumi Industri dan Solanna Group LLC, ditandatangani oleh Director **Tjaw Hioeng** dan Presiden Solana Gorup **David Fordon**;

11 MoU tentang Furnitur/Wood Product antara Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIMKI) dan American Hardwood Export Council, ditandatangani oleh Head of Promotion and Marketring for Americas **Rudy Hartono** dan American Hardwood Export Council **Michael Snow**;

Acara Gala Iftar Dinner in Honor of H.E. Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia dihadiri oleh kalangan pemerintah dan pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat, di Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (18/02/2026).

Kadin Teken Kerja Sama dengan US-ABC, Bidik Lonjakan Ekspor Alas Kaki ke AS

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie (Kanan) dan Interim President of ASEAN Business Council (US-ABC) Brian McFeeters menandatangani Perjanjian Kerja Sama perdagangan dan investasi, di sela-sela acara U.S.-Indonesia Business Dialogue di kantor pusat U.S. Chamber of Commerce (USCC), Washington DC, Amerika Serikat (AS), Kamis (19/02/2026).

Washington DC – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani Memorandum of Agreement atau Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Strategis Kerja Sama Perdagangan dan Investasi Bilateral dengan US-ASEAN Business Council (US-ABC).

Penandatanganan dilakukan di sela-sela forum US-Indonesia Economic Dialogue yang diselenggarakan oleh US-ABC, U.S. Chamber of Commerce (USCC), dan US-Indonesia Society (USINDO) bekerja sama dengan Kadin Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor pusat USCC, Washington DC, Amerika Serikat (AS), Kamis (19/02/2026) waktu setempat.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, penandatanganan tersebut bertujuan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha Indonesia di AS.

“Tanda tangan antara Kadin dengan US-ASEAN Business Council, intinya bagaimana kita bisa memperbesar pasar buat para pedagang kita, para investor dari Indonesia, para pengusaha dari Indonesia untuk bisa mengakses pasar di Amerika (Serikat),” ujar Anindya, atau Anin sapaan akrabnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie (tujuh dari kanan) berfoto bersama para delegasi dari Indonesia, di antaranya Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin Indonesia Pahala Mansury (tiga dari kanan), WKU Bidang Hilirisasi Kadin Indonesia sekaligus President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas (enam dari kanan), WKU Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani (delapan dari kanan), serta WKU Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega di sela-sela acara U.S.-Indonesia Business Dialogue yang digelar di kantor pusat USCC, Washington DC, Amerika Serikat (AS), Kamis (19/02/2026).

“Sebagai contoh, Anin menyoroti sektor alas kaki. Anin menyebut nilai ekspor alas kaki Indonesia ke AS saat ini sekitar 120 juta dolar AS, sementara Vietnam telah mencapai 600 juta dolar AS.

“Nah itu hampir 4-5 kali lipatnya,” kata Anin.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspor, selama tetap menjaga daya saing, khususnya dari sisi tarif.

Jadi sekarang Indonesia mempunyai kesempatan untuk meningkatkan itu semua selama bisa tetap kompetitif. Secara daripada tarif, harus kompetitif. Tapi Indonesia juga mempunyai kesempatan untuk meningkatkan jumlah dari para perdagangan yang tentunya akan membawa pertumbuhan Indonesia, lapangan kerja, dan lain-lain,” ujar Anin.

Anin menambahkan, Kadin saat ini berfokus mendukung pelaku usaha yang telah aktif melakukan ekspor, antara lain di sektor garmen, tekstil, alas kaki, furnitur, dan elektronik. Namun, kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan perdagangan. Anin menegaskan pentingnya mendorong investasi AS masuk ke Indonesia.

“Ingat, bahwa di Indonesia ini dibutuhkan banyak investasi. Sampai 60 miliar dolar AS FDI, Foreign Direct Investment. Nah, ini juga salah satu cara untuk kita untuk mendapatkan ini semua,” ujar Anin.

Lebih lanjut, Anin menilai kesepakatan dagang (Agreement on Reciprocal Trade) yang tengah dipersiapkan Indonesia dan AS berpotensi menjadi tonggak penting dalam hubungan ekonomi kedua negara.

“Karena trade agreement yang akan ditandatangani oleh kedua negara ini benar-benar bisa menjadi suatu sejarah. Supaya perdagangan dan investasi-investasi selalu meningkat. Membawa lapangan kerja, membawa juga pertumbuhan,” kata Anin.

Anin juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja nasional, termasuk di bidang teknologi, guna mendorong transformasi ekonomi ke arah industri bernilai tambah.

“Sehingga kita juga bisa menjadi negara maju yang makin hari akan mentransformasi ekonominya menjadi industri-industri yang lebih mempunyai nilai tambah,” pungkas Anin.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin Indonesia Pahala Mansury, WKU Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega dan WKU Bidang Hilirisasi Kadin Indonesia sekaligus President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

Kunjungi Georgetown University, Anindya Bakrie Targetkan Fortune 500 Perusahaan dari Indonesia

Dekan School of Foreign Service Joel Hellman (empat dari kiri) berfoto bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (lima dari kiri), Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Syahrir (lima dari kanan), serta WKU Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani (tiga dari kiri) dan Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin Indonesia Pahala Mansury di sela-sela pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Kamis (19/02/2026).

Washington DC – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Danantara Indonesia melakukan kunjungan ke Georgetown University School of Foreign Service dan Georgetown University McDonough School of Business di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Kamis (19/02/2026) waktu setempat. Kunjungan itu disambut langsung oleh Dekan School of Foreign Service, Joel Hellman.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan bahwa kehadiran Kadin di Georgetown University merupakan bagian dari upaya memperkuat peran Kadin Global Engagement Office (GEO) sebagai jembatan kolaborasi internasional.

Anin sapaan akrabnya menekankan pentingnya kemitraan dengan institusi global terkemuka untuk mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan Indonesia berkelas dunia.

“Di sini memperjuangkan bagaimana Kadin Global Engagement Office (GEO) itu bisa bekerja sama untuk melahirkan Fortune 500 perusahaan ke depannya,” kata Anin.

Senada dengan Anin, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Syahrir menekankan pentingnya kolaborasi lintas institusi untuk membawa konsep “Indonesia Incorporated” ke tingkat global.

Amazing, kolaborasi yang akan kita lakukan baik di Danantara dan Kadin GEO untuk kerja sama, untuk membawa Indonesia Incorporated jadi global, dan menerjemahkan apa yang terjadi dengan Agreement on Reciprocal Trade ini dan apa impact positifnya buat para pengusaha di Indonesia,” tutur Pandu.

Sementara itu, menanggapi momentum penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan AS, Anin menegaskan perlu dioptimalisasikan melalui langkah-langkah konkret, baik dari sisi peningkatan akses pasar maupun realisasi investasi.

“Dengan adanya kita lagi menandatangani Agreement on Reciprocal Trade, nah ini bisa menjadi suatu hal bagaimana bisa memaksimalkan supaya perdagangan dan investasi bisa benar-benar kejadian di Indonesia dan membawa kesejahteraan bagi para pekerja, penduduk, dan lain-lain,” ujar Anin.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani menyebut hubungan Indonesia-AS saat ini berada pada fase yang sangat penting.

Menurutnya, pascapenandatanganan kesepakatan dagang, diperlukan langkah strategis agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh pelaku industri nasional.

“Tentunya kita mau bisa mengambil manfaat dan ini juga perlu kita sosialisasikan ke banyak industri di Indonesia dan bagaimana juga deepening, kerja sama bilateral Indonesia-Amerika (Serikat), juga bagaimana kita juga bisa memanfaatkan ini untuk bagian dari global supply

chain Indonesia. Jadi banyak sekali PR (pekerjaan rumah) nanti dari post kunjungan ini dan Georgetown juga bisa menjadi knowledge partner dari Kadin GEO untuk bisa mendukung pengembangan ekonomi Indonesia,” kata Shinta.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin Indonesia Pahala Mansury.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri, James T. Riady (kiri) bersama Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie U.S.-Indonesia Business Dialogue yang digelar di kantor pusat USCC, Washington DC, Amerika Serikat (AS), Kamis (19/02/2026)

James Riady: Perjanjian Perdagangan Timbal-Balik AS–RI, Momen Bersejarah dan Transformasi Ekonomi

WASHINGTON, D.C., Investortrust.id — Perjanjian perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi momen bersejarah bagi dunia usaha kedua negara. Penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade atau Perjanjian Perdagangan Komprehensif ini bukan sekadar perjanjian biasa. "Ini adalah perjanjian transformasional," kata James Riady, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Washington, D.C., Sabtu (21/2/2026).

Sebagai salah satu delegasi Kadin Indonesia yang ikut dalam rombongan Presiden, James menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian tersebut. Ia menyebut momen ini sebagai titik balik bersejarah dalam hubungan ekonomi Indonesia–Amerika Serikat.

Perjanjian ini lahir pada saat penyelarasan strategis antara dua kekuatan ekonomi besar: Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar dunia dan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar dan paling dinamis di antara negara berkembang. "Dengan ditandatanganinya perjanjian komprehensif ini, kita memasuki fase baru hubungan ekonomi yang lebih dalam, lebih terstruktur, dan lebih dapat diprediksi," ujarnya.

Menurut James, ada tiga alasan utama mengapa perjanjian ini layak disebut transformasional. Pertama adalah kepastian. Perjanjian ini memberikan aturan yang lebih jelas, akses pasar yang lebih dapat diprediksi, serta pengurangan hambatan regulasi bagi pelaku usaha kedua negara. "Kepastian adalah mata uang utama investasi," jelasnya. Dalam dunia usaha, kepastian regulasi dan arah kebijakan menjadi fondasi bagi keputusan investasi jangka panjang.

Kedua adalah skala kerja sama yang luas. Perjanjian ini membuka ruang penurunan hambatan perdagangan, peningkatan arus bilateral, dan integrasi rantai pasok. James menilai hal ini memungkinkan perusahaan Amerika memproduksi barang di Indonesia, ikut mengembangkan kawasan, sekaligus memperkuat posisi produk Indonesia memasuki pasar global. "Ini bukan hanya tentang ekspor-impor, tetapi tentang membangun ekosistem produksi bersama," katanya.

Ketiga adalah dimensi teknologi dan rantai nilai. Masa depan perdagangan, menurut James, tidak lagi hanya soal komoditas, tetapi juga layanan digital, manufaktur maju, penggunaan kecerdasan buatan, transisi energi yang lebih mulus, peningkatan kualitas kesehatan, serta penerapan agritech. Perjanjian ini membuka pintu bagi kemitraan teknologi yang lebih dalam dan kolaboratif, bukan sekadar transaksi barang.

James menambahkan, Indonesia datang ke Washington dengan momentum ekonomi yang kuat. Pertumbuhan sekitar 5% pada 2025, penguatan dalam empat kuartal terakhir, konsumsi domestik yang solid, serta program pemerintah berskala besar di sektor perumahan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan hilirisasi industri menjadi fondasi yang kokoh. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, kelas menengah yang terus tumbuh, serta pasar digital yang berkembang pesat, Indonesia dinilai bukan hanya pasar yang besar, tetapi juga basis produksi strategis dan mitra teknologi jangka panjang.

Ia juga menekankan bahwa penyelarasan antara kemauan politik dan arah kebijakan ekonomi nasional menjadi faktor kunci keberhasilan perjanjian ini. Presiden Prabowo, menurutnya, menunjukkan komitmen kuat untuk memperdalam kemitraan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta membangun hubungan strategis jangka panjang dengan Amerika Serikat. "Kehadiran Presiden dalam penandatanganan perjanjian mengirim pesan jelas bahwa Indonesia terbuka untuk kerja sama bisnis yang serius dan berkelanjutan," ungkap James.

Bagi dunia usaha Amerika, Indonesia menawarkan stabilitas, pragmatisme, serta posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik. "Inilah saatnya masuk ke pasar, memperluas operasi, membentuk joint venture jangka panjang, dan berpartisipasi dalam fase pertumbuhan Indonesia berikutnya," ujar James.

Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa perjanjian ini bukan hanya pencapaian pemerintah dengan pemerintah. "Ini adalah platform bagi komunitas bisnis kedua negara untuk tumbuh bersama. Hari ini kita tidak hanya menandatangani perjanjian. Kita sedang membangun kepercayaan, kemitraan, dan generasi baru kerja sama ekonomi," pungkasnya.

Sinyal Kuat Kebangkitan Industri Galangan Kapal Dalam Negeri

Ketua Umum Kadin Indonnesia, Anindya Novyan Bakrie menyampaikan sambutannya dalam Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia "Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional" yang digelar di AYANA Midplaza Jakarta pada Selasa (10/02/2026).

Dorongan agar industri galangan kapal nasional kembali menjadi tulang punggung kedaulatan maritim Indonesia mengemuka kuat dalam sebuah pertemuan lintas kementerian dan pelaku usaha. Ada komitmen luar biasa dan sinyal yang kuat untuk membangkitkan industri galangan kapal dalam negeri dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional" di Hotel Ayana, Jakarta, Selasa (10/02/2026), yang digelar Kadin Indonesia dan Indonesian National Shipowners' Association (INSA).

Dibuka oleh Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo, FGD dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perindustrian gus Gumiwang Kartasasmita,
Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti a Putri, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, dan Wakil Ketua INSA, Go Darmadi.

Komitmen untuk memperkuat industri galangan kapal domestik disampaikan Hashim Djojohadikusumo. Dia menyebut bahwa seluruh kapal yang digunakan oleh BUMN strategis, khususnya Pertamina, harus dibangun di dalam negeri. Ini buka instruksi Hashim, melainkan perintah langsung Presiden dan menjadi pedoman kebijakan yang tidak bisa ditawar.

Kebijakan pembangunan kapal di dalam negeri bukan sekadar wacana, melainkan sudah disepakati sebagai pedoman resmi. "Semua kapal Pertamina harus dibangun di dalam negeri.

ni perintah Presiden," tegas Hashim. Pesan tersebut telah disampaikan langsung kepada jajaran manajemen Pertamina dan para pemangku kepentingan terkait. Namun Hashim juga mengingatkan pentingnya keadilan dan profesionalisme di kedua sisi. Industri galangan nasional harus bersikap fair dan realistis terhadap kebutuhan pengguna jasa.

Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonnesia, Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan sambutan dalam Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia "Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional" yang digelar di AYANA Midplaza Jakarta pada Selasa (10/02/2026).

Hashim mengakui selama ini ada tantangan dari sisi galangan, seperti waktu pengerjaan yang lebih lama, sehingga tidak semua kesalahan bisa dibebankan kepada Pertamina. Momentum perubahan, lanjut Hashim, kini semakin terbuka karena hampir seluruh pimpinan di kementerian dan lembaga terkait merupakan figur baru. Mereka menunjukkan respons positif dan komitmen yang kuat, terutama menata ulang berbagai aturan sekaligus mengeliminasi aturan yang menghambat.
Hashim lalu menarik pelajaran dari sejarah kebangkitan Korea Selatan pada dekade 1960–1970-an. Pemerintah Korea kala itu memberi penugasan khusus kepada

korporasi nasional: industri galangan kapal, otomotif, elektronik, hingga manufaktur berat agar dibangun secara terintegrasi dalam semangat "Korea Incorporated". "Kita harapkan hari ini Indonesia bisa lahir kembali dengan pendekatan serupa, khususnya di bidang pelayaran dan industri maritim," ujarnya.

Hashim pun menyoroti capaian konkret industri galangan nasional. Hashim memuji peluncuran kapal raksasa berbobot sekitar 6.700 ton dengan bendera Merah Putih yang dinilainya relatif tepat waktu—sebuah pencapaian penting bagi industri dalam negeri.

Menurutnya, satu proyek kapal saja mampu menggerakkan ekosistem besar: sekitar 100–150 vendor terlibat, menyerap 1.000 hingga 3.000 tenaga kerja langsung dan tidak langsung, hingga menghidupkan ekonomi rakyat kecil di sekitar galangan.
Lebih jauh, Hashim menyebut bukti kepercayaan yang mulai tumbuh. Beberapa galangan nasional telah memperoleh tambahan pesanan kapal, termasuk untuk kebutuhan pertahanan dan penguatan minimum essential force.

Dalam konteks global, Hashim melihat peluang emas. Ia mengungkapkan bahwa Korea Selatan kini justru kekurangan tenaga kerja terampil, khususnya welder. Bahkan, negara tersebut meminta Indonesia memasok tenaga kerja las. "Ini ironi sekaligus peluang. Mengapa kita tidak memaksimalkan mereka bekerja di dalam negeri saja?" ujarnya.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan paparan mengenai industri perkapalan nasional dalam FGD Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia di AYANA Midplaza Jakarta pada Selasa (10/02/2026).

Fakta dan Kelemahan

Lantas, apa yang sesungguhnya terjadi dengan industri kapal dalam negeri? Melihat penuturan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, kita dibuat miris. Purbaya menuding, ketertinggalan industri galangan kapal nasional lebih disebabkan oleh ulah bangsa sendiri. Perusahaan nasional, BUMN maupun swasta, lebih senang mengimpor kapal bekas daripada membeli kapal baru buatan dalam negeri. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun tidak pernah mengorder kapal buatan dalam negeri.

Masalahnya bukan pada kemampuan, melainkan kesempatan. Industri galangan kapal nasional sering kali tidak diberi ruang untuk berkembang dan naik kelas. “Kita punya orang-orang yang mampu, tetapi tidak diberi kepercayaan untuk menangani proyek besar. Padahal, kalau kita mau serius, industri galangan kapal bisa menjadi bagian penting dari strategi industrialisasi dan kedaulatan ekonomi nasional,” tegas Purbaya.

Purbaya mengaku pernah berkecimpung di bidang maritim dan energi, dan pernah mengunjungi galangan kapal di Batam. Dia berkesimpulan bahwa kemampuan teknis SDM Indonesia sebenarnya sangat baik dan kompeten.

Lantaran tidak ada dukungan, di Batam yang dulu ada sekitar 77 galangan, sekarang tinggal sekitar tujuh yang benar-benar aktif.

Kapal bekas asal luar negeri memang jauh lebih murah. Neski umurnya sudah tua, tetap masih bisa dipakai. Ini menciptakan persaingan yang tidak seimbang bagi galangan domestik. Akibatnya, perusahaan-perusahaan nasional —baik BUMN maupun swasta— lebih memilih membeli kapal bekas dari luar negeri. “Ini ironis,” ujar Purbaya.

Purbaya lantas menunjuk data INSA bahwa ada sekitar 2.491 kapal yang umurnya sudah lebih dari 25 tahun. Itu pasti harus diganti. Pertanyaannya, siapa yang membangun kapal-kapal pengganti itu. Kalau melihat kondisi galangan domestik, mungkin hanya 10 galangan—atau bahkan kurang—yang benar-benar siap. Tapi, masalahnya, biaya produksi mahal. Bahan baku mahal, dipajaki, dan prosesnya berbelit. Bagi Purbaya, beli kapal baru di dalam negeri, biayanya mungkin berat. Tapi, beli kapal bekas dari luar negeri, meskipun murah di awal, jangka panjangnya merugikan industri dalam negeri. Dia melihat itu sebagai akal-akalan para pemburu renta untuk mendapatkan fee impor.

“Contohnya di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Katanya ada kebutuhan sekitar 1.500 kapal, bahkan total unit mencapai lebih dari 11.000. Tapi pertanyaannya sederhana: berapa galangan dalam negeri yang benar-benar mendapat order dari KKP? Hampir tidak ada!” kata Menkeu.

Kalau tidak ada order, jangan-jangan masalahnya bukan di industri, tapi di koordinasi. Apakah industrinya kurang aktif, atau memang sistemnya yang tidak mendukung? Riset sudah banyak dilakukan, dana riset ada, tapi sering kali hasilnya tidak dipakai. “Di hadapan Presiden selalu disebut angka-angka besar —seribu ini, seribu itu— tetapi realisasinya di lapangan tidak jelas,” ungkap Menkeu.

Indonesia tidak bisa terus membeli kapal dari luar negeri karena bakal mematikan industri serupa dalam negeri mati. “Padahal, kita bicara target pertumbuhan ekonomi 8%. Tanpa industri, itu mustahil!” seru Purbaya.

Menkeu mengakui semua industri menghadapi tantangan. Harga kapal, kualitas, SDM—itu isu umum. Isu utamanya adalah: Industri galangan kapal nasional mau ke mana? Tujuannya belum didefinisikan dengan jelas.

“Kita punya Kadin, kita punya para menteri di sini. Mari duduk bersama, tentukan dengan jelas arah dan programnya. Kalau tidak ada komunikasi, ya kita tidak ke mana-mana. Padahal dukungan fiskal dan kepabeanan sudah ada. Bea Cukai dan Kementerian Keuangan siap mendukung 100% kalau arahnya jelas,” ungkap Menkeu.

“Saya bicara ini dengan emosi, karena selama bertahun-tahun saya melihat industri galangan kapal hanya menjadi penonton. Sekarang kebetulan saya berada di posisi yang bisa mendorong,“ kata Purbaya.

Sebagai negara maritim, Purbaya prihatin kapalnya dibeli dari luar. “Orang kita yang ahli tidak diberi kesempatan karena sebagian dari kita rakus. Ini yang disebut Presiden Prabowo sebagai serakah,“ tegasnya.

Terus terang, kata Menkeu, pihaknya sangat senang bisa kembali membahas isu industri perkapalan. Sejak lama ia merasa sektor ini penting, tetapi sering kali tidak mendapat perhatian yang memadai.

Masalahnya sering kali bukan pada kebijakan pusat, tetapi pada implementasi di lapangan. Di atas kertas semuanya terlihat rapi, tapi realitas di lapangan sering berbeda. Koordinasi antar-kementerian, antara pusat dan daerah, masih menjadi tantangan.

Kalah Bersaing

Bagaimana dengan suara para pengusaha sendiri tentang kritik yang dilontarkan Menkeu? Go Darmadi, Wakil Ketua Umum INSA, memaparkan sejumlah kendala struktural yang membuat industri angkutan kapal nasional belum mampu berkompetisi dengan industri perkapalan asing, khususnya dari China. Kendala tersebut mencakup aspek pembiayaan, harga kapal, waktu pengiriman, hingga lemahnya ekosistem industri galangan kapal di dalam negeri.

Menurut Go Darmadi, agenda revitalisasi dan peremajaan armada kapal nasional sejatinya telah menjadi target bersama.

Pemerintah dan pelaku industri sepakat bahwa peremajaan idealnya dilakukan melalui pembangunan kapal di dalam negeri. Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar yang belum sepenuhnya teratasi. “Saya perlu mengemukakan ekosistem industri kapal Indonesia mahal,” ujarnya. Ekosistem industri perkapalan merupakan ekosistem yang mahal dan kompleks karena melibatkan banyak pihak, mulai dari pemilik kargo, pemilik kapal, hingga galangan. Dalam rantai tersebut, pemilik kargo memegang peran kunci. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, volume kargo domestik, ekspor, dan impor juga ikut naik, sehingga kebutuhan kapal kargo otomatis bertambah.

Tapi, dia terus terang bahwa pengusaha selalu membandingkan harga pembangunan kapal dalam negeri dengan galangan di China. Realitanya, Indonesia masih tertinggal, baik dari sisi harga maupun waktu penyelesaian.

Ia mencontohkan, galangan kapal di China mampu menyelesaikan pembangunan kapal 16 hingga 18 bulan, bahkan ada yang sudah meluncurkan kapal dalam 10 hingga 12 bulan.

Sementara di dalam negeri, waktu tersebut sulit dicapai karena hampir seluruh komponen utama, khususnya mesin, masih harus diimpor.

Pemerintah memprioritaskan pasokan mesin untuk galangan domestiknya sendiri, sehingga penyelesaian dan masa pengiriman produk bisa lebih cepat. Di lain sisi, galangan Indonesia pun menunggu mesin-mesin buatan China. Situasi inilah yang membuat ketepatan waktu penyerahan kapal dalam negeri terlambat.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah pembiayaan. Darmadi menyoroti ketidaksesuaian antara usia ekonomis kapal 25-30 tahun, sedangkan tenor kredit perbankan hanya 5-7 tahun.

Menanggapi kendala itu, Hashim Djojohadikusumo, pembiayaan tenor panjang ini harus dibahas dengan Danantara.

Selain itu, rendahnya tarif angkutan domestik juga menjadi tantangan tersendiri. Freight dalam negeri dinilai tidak cukup tinggi untuk menutup biaya investasi kapal baru dengan skema pembiayaan jangka pendek. Ia menilai solusi yang dibutuhkan adalah pembiayaan jangka panjang hingga 20 atau 25 tahun agar investasi bisa ditarik lebih panjang dan tetap layak dengan tarif domestik.

Darmadi menyampaikan, kebutuhan peremajaan kapal nasional menjadi isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani. Saat ini hampir 2.500 kapal di Indonesia telah berusia lebih dari 25 tahun. Itu didominasi kapal kargo umum, lebih dari 1.000 unit.

(Dari kanan ke kiri) Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Ketua Umum Kadin Indonnesia, Anindya Novyan Bakrie, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonnesia Hashim S. Djojohadikusumo, Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita berfoto bersama usai FGD Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia di AYANA Midplaza Jakarta pada Selasa (10/02/2026).

Ketua Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Carmelita Hartoto saat memberikan tanggapan dalam sesi diskusi FGD Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia di AYANA Midplaza Jakarta pada Selasa (10/02/2026).

Usulan ke Pemerintah

Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto menegaskan bahwa industri pelayaran nasional sejatinya memiliki komitmen tinggi untuk memaksimalkan penggunaan produk kapal dalam negeri, ketimbang kapal hasil produksi luar negeri.

"Selain (membeli) tug and barges (dari galangan domestik), kita juga sudah membangun kapal kontainer, juga ada kapal ro-ro. Jadi kita sudah membangun Pak, nggak semuanya ambil dari luar negeri," ujar Carmelita.

INSA dan pemerintah sudah menyusun roadmap pembangunan kapal nasional di dalam negeri. Namun, demikian asosiasi tak bisa memaksa para pelaku usaha pelayaran nasional untuk membeli produk galangan nasional asing. Asosiasi hanya bisa mengimbau.

Carmelita menegaskan bahwa dalam praktiknya, sudah banyak perusahaan pelayaran yang membangun kapal di galangan nasional, terutama untuk segmen tug and barge yang menjadi tulang punggung angkutan komoditas dalam negeri.

Carmelita menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan atas penyiapan aturan turunan KMK 417/1996 terkait perpajakan kapal asing. Kebijakan ini penting untuk menciptakan level playing field bagi pelayaran nasional, sekaligus memastikan kepatuhan pajak kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia. Dukungan regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri maritim nasional secara keseluruhan.

Carmelita menekankan pentingnya ekosistem maritim yang sehat dan bertumbuh, yang bertumpu pada tiga pilar utama saling terkait, yakni pemilik muatan (kargo), perusahaan pelayaran, dan galangan kapal. Ketiganya membentuk satu rantai pasok yang tidak dapat dipisahkan.

Carmelita meminta dukungan lebih konkret dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dalam menciptakan skema pembiayaan pengadaan kapal yang menarik bagi perusahaan pelayaran agar mau membangun kapal di galangan dalam negeri. Salah satu skema yang diusulkan adalah pola pembayaran dengan mekanisme tengki dan counter bank guarantee, di mana pembayaran penuh oleh perusahaan pelayaran dilakukan setelah kapal diserahkan.

Dengan dukungan bank garansi, kata Carmelita, galangan kapal dapat memperoleh pembiayaan dari perbankan, sehingga risiko keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi kapal dapat diminimalkan.

Darmadi menilai kebijakan cabotage terbukti memberikan dampak positif bagi pertumbuhan armada nasional. Dengan penerapan kebijakan tersebut, jumlah kapal berbendera Indonesia terus meningkat dan kini telah mencapai sekitar 51 ribu unit kapal kargo dan penumpang.

Pengusaha galangan kapal asal Kalimantan Timur (Kaltim) yang juga Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, mengusulkan agar industri galangan kapal nasional mendapatkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), setara dengan fasilitas yang selama ini dinikmati oleh pelaku industri perkapalan nasional yang tergabung dalam INSA.

“INSA mendapatkan fasilitas untuk bebas PPN. Tetapi galangan ini tidak mendapatkan fasilitas yang sama,” tegas Rudy.

Menurut Rudy, ketimpangan perlakuan fiskal tersebut menjadi salah satu penyebab lambatnya perkembangan industri galangan kapal nasional.

Selain insentif fiskal, Rudy juga menyoroti persoalan standar dan sertifikasi kapal nasional. Ia menilai kemampuan SDM galangan kapal Indonesia tidak kalah dengan negara lain, namun terkendala pengakuan internasional. Saat ini, mayoritas kapal produksi dalam negeri hanya menggunakan klasifikasi Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), yang menurut Rudy belum diakui secara luas di pasar global.

“BKI ini bukan liga utama, masih liga dua. BKI tidak diakui di dunia. Jadi kalau kita mengirim produk kapal ke luar negeri, pasti ada kendala,” ujar Rudy. Akibatnya, pasar ekspor kapal Indonesia menjadi sangat terbatas, sementara negara seperti Vietnam dan China telah jauh melangkah dengan sertifikasi internasional yang diakui secara global.

Selain itu, Rudy juga menyoroti industri galangan dalam negeri yang masih didominasi pembangunan kapal kecil. Sementara kapal berbobot mati besar, termasuk untuk sektor minyak dan gas, hampir seluruhnya didatangkan dari luar negeri.

Rudy mencontohkan Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah dengan aktivitas maritim tinggi. Provinsi ini merupakan salah satu dari tiga sentra galangan kapal terbesar di Indonesia, namun mayoritas galangan masih bersifat handmade sehingga biaya produksi menjadi mahal. Ia menilai, transformasi dari galangan berbasis kerajinan menjadi industri berbasis pabrikasi perlu didukung secara serius oleh pemerintah.

Kebijakan dan Respons Pemerintah

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti menegaskan bahwa pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan utilisasi galangan kapal nasional melalui berbagai kebijakan perdagangan yang adaptif dan proindustri. Kementerian Perdagangan siap memberikan dukungan konkret agar industri perkapalan dalam negeri semakin berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Produksi kapal tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan komoditas pendukung, khususnya besi baja dan berbagai komponen industri lainnya. Menurut Wamendag, penguatan industri hulu menjadi fondasi penting bagi pengembangan galangan kapal nasional.

Di pasar global, Indonesia tercatat sebagai produsen baja mentah peringkat ke-14 dunia dengan volume produksi sekitar 18 juta ton. Posisi ini mencerminkan bahwa Indonesia telah memiliki industri baja yang mapan dan mampu menopang kebutuhan sektor strategis, termasuk perkapalan.

Kementerian Perdagangan telah menyiapkan kerangka kebijakan yang mendukung industri galangan kapal, termasuk melalui Permendag Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Dalam aturan tersebut, impor besi baja dapat dilakukan baik oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U) maupun Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi. Selain itu, importasi juga harus dilengkapi dengan persetujuan impor dan laporan surveyor, dengan pengawasan ketat di perbatasan yang melibatkan Bea Cukai.

Ihwal impor kapal, Permendag Nomor 24 Tahun 2025 membuka peluang impor kapal bekas dengan syarat penggunaan minimal empat tahun sebelum dapat dialihkan, guna memastikan kapal tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk operasional, bukan semata untuk diperdagangkan kembali.

Tidak Ada Kepentingan

Menkeu Purbaya yakin industri galangan kapal nasional dinilai memiliki kemampuan besar untuk berkembang sebagai salah satu pilar manufaktur strategis, namun hingga kini masih belum dimanfaatkan secara optimal karena minimnya kesempatan. Masih under utilized karena tidak diberi kesempatan di dalam negeri. Juga ada praktik-praktik dan kebijakan yang kurang berpihak.

Menkeu minta koordinasi yang serius. Menteri Perindustrian perlu duduk bersama wakil KKP dan Kadin, menyelaraskan alokasi kebutuhan kapal dengan kemampuan galangan dalam negeri. Jangan sampai tidak ada satu pun galangan yang mendapat pesanan. “Itu aneh,” ujar Menkeu.

Industri galangan kapal ini perlu dibenahi: apa kekurangannya, dukungan seperti apa yang dibutuhkan. “Kalau itu jelas, saya siap mendukung,” kata Menkeu.

Apalagi saat ini pemerintah memiliki Tim Satgas Debottlenecking, tim beranggotakan 29 kementerian dan lembaga yang betugas menangani hambatan-hambatan nyata di lapangan. Menkeu menyayangkan pelaku industri galangan kapal tidak pernah masuk ke forum penting ini untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie menyampaikan apresiasi atas sikap berpihak pemerintah terhadap industri galangan kapal domestik. Ia pun berharap Kadin bisa diajak berpartisipasi dalam Satgas Debottlenecking, untuk bisa memberikan masukan. Anindya menilai kebangkitan industri maritim akan berdampak luas bagi ekonomi nasional.

“Industri ini padat karya, padat bisnis, dan padat teknologi,” ujarnya. Pria yang akrab disapa Anin ini menilai penguatan galangan kapal akan meningkatkan daya saing Indonesia di sektor maritim global.

Anin pun menyebut langkah ini sejalan dengan semangat konsep 'Indonesia Incorporated' yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. "Jadi saya rasa ini salah satu contoh bagaimana problem solving tapi juga bisa bermanfaat bagi semua orang," tuturnya.

Adapun Hashim Djojohadikusumo menegaskan posisinya yang netral. Ia tidak memiliki kepentingan bisnis di sektor pelayaran atau galangan kapal. “Saya hanya menjadi perantara, menjembatani pemerintah dan dunia usaha,” katanya.

Dengan dukungan Presiden, kesiapan kementerian teknis, dan respons positif otoritas fiskal, Hashim optimistis industri galangan kapal nasional dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. “Kesempatan ini jarang terjadi. Semua hadir, semua siap. Tinggal kita ambil momentum,” kata Hashim.

Meski begitu, Hashim menekankan kebijakan itu disertai syarat harga yang kompetitif. Dia mengingatkan agar galangan kapal nasional tidak memasang harga tinggi tanpa efisiensi biaya.

Hashim Djojohadikusumo optimistis sektor industri perkapalan berpotensi menjadi pendongkrak baru pertumbuhan ekonomi. Momentum ini harus dimanfaatkan secara serius oleh semua pemangku kepentingan. Komitmen tinggi secara kolektif sangat diperlukan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa menjadi basis industri galangan yang kompetitif di kawasan regional.

ANINDYA BAKRIE: ABAC MEETING I 2026 JADI MOMENTUM AWAL INTEGRASI KAWASAN ASIA - PASIFIK GUNA MENINGKATKAN ARUS INVESTASI DAN PERDAGANGAN

Photo Group Session Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto (delapan dari kanan) dengan peserta ABAC Meeting I 2026, di antaranya Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (tiga dari kiri) yang juga merupakan Ketua ABAC Indonesia, serta Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani (enam dari kiri) yang juga merupakan anggota ABAC Indonesia di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Sabtu (07/02/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Business Advisory Council (ABAC) menggelar ABAC Meeting I 2026 yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada 7-9 Februari 2026.

Pertemuan ini merupakan forum strategis yang mempertemukan para pemimpin dunia usaha dari 21 ekonomi anggota APEC untuk merumuskan rekomendasi kebijakan sektor bisnis yang akan disampaikan kepada para Pemimpin Ekonomi APEC.

Ketua Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Business Advisory Council (ABAC) Indonesia sekaligus Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan bahwa pentingnya kawasan Asia-Pasifik sebagai pusat perdagangan dan investasi.

“Saya telah terlibat dalam APEC sejak 2009 dan selalu menikmati setiap kesempatan untuk berinteraksi di kawasan ini, yang kita semua ketahui merupakan kawasan perdagangan, kawasan investasi, serta kawasan yang mendorong kemakmuran, pertumbuhan, perdamaian, dan stabilitas,” ujar Anin, sapaan akrab Anindya Novyan Bakrie di sela-sela ABAC Meeting I 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta (7/2/2026).

Anin juga menegaskan bahwa ABAC Meeting I 2026 menjadi momentum awal untuk mendorong integrasi di kawasan Asia – Pasifik melalui penguatan infrastruktur fisik maupun nonfisik guna meningkatkan arus investasi dan perdagangan.

“Nah, tadi bicara salah satu fokusnya ialah regional integration. Integrasi secara infrastruktur, baik keras maupun lunak. Dan di sini penting sekali karena kita ujungnya ingin mencari investasi dan perdagangan,” ujar Anin dalam Press Conference ABAC Meeting I 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta pada Senin (09/02/2026).

Anindya mengatakan ABAC Meeting I ini menghasilkan pembahasan seperti dalam kelompok kerja keberlanjutan, Indonesia mengusulkan pembentukan Carbon Center of Excellence sebagai kontribusi konkret bagi agenda kerja sama kawasan. Kemudian, hasil ABAC I meeting ini juga berhasil merumuskan usulan di bidang finansial, yakni mempromosikan sistem finansial yang inklusif atau finance inclusion.

“Jadi bukan saja kita menjadi event organizer, tapi kita juga bantu sub-agenda. Bahkan memasukkan juga lesson learn dari Indonesia untuk dunia,” terang Anin.

Terlebih, Anin menuturkan kehadiran empat menteri yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Luar Negeri RI Sugiono, dan Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, selama dua hari pertemuan dimanfaatkan untuk mempromosikan peluang investasi dan perdagangan Indonesia kepada delegasi internasional sebagai bagian dari penguatan sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam kerangka Indonesia Incorporated.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie yang juga merupakan Ketua ABAC Indonesia memberikan sambutan pada Opening Ceremony ABAC Meeting I 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Sabtu (7/2/2026).

“Nah, tadi juga kita bersyukur selama 2 hari ada 4 menteri yang datang untuk tanda kutip jualan. Supaya investasi dan perdagangan bisa lebih besar lagi,” tegas Anin.

Terkait peningkatan perdagangan dan investasi, Anin menegaskan melalui pertemuan ABAC Meeting I ini juga menjadi tonggak bagi Indonesia pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Dia mengungkapkan, Indonesia menargetkan target investasi yang mampu melampaui Vietnam di pasar perdagangan global.

“Indonesia ekspor 250 miliar dolar AS setahun, Vietnam 500 miliar dolar AS per tahun. Jadi apa yang kita mesti lakukan untuk sama-sama, tidak bisa pemerintah sendiri dan tidak bisa juga tentunya dunia usaha sendiri untuk meningkatkan ini semua,” kata Anin.

“Indonesia ekspor 250 miliar dolar AS setahun, Vietnam 500 miliar dolar AS per tahun. Jadi apa yang kita mesti lakukan untuk sama-sama, tidak bisa pemerintah sendiri dan tidak bisa juga tentunya dunia usaha sendiri untuk meningkatkan ini semua,” kata Anin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menekankan pentingnya APEC bagi perekonomian Indonesia, mengingat sekitar 70 persen ekspor Indonesia ditujukan ke negara-negara anggota APEC.

“Oleh karena itu, Indonesia perlu mendukung agar APEC berjalan dengan baik karena ini merupakan salah satu kawasan ekonomi terbesar. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan melalui negara-negara APEC ini kita dapat meningkatkan ekspor,” ujarnya.

Menko Airlangga menekankan situasi ekonomi saat ini menjadi krusial karena lanskap ekonomi global dituntut lebih dari sekadar pemulihan, namun juga bertransformasi.

“Namun (juga) menuntut transformasi mendasar seiring fokus kita pada percepatan pertumbuhan inklusif regional melalui reformasi struktural. Kita harus mengakui bahwa kekuatan kita terletak pada integrasi kita,” tuturnya.

Menko Airlangga menambahkan, Indonesia juga terus mendorong digitalisasi, termasuk penguatan sistem pembayaran digital lintas negara yang saat ini telah terhubung dengan sejumlah negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan kawasan Timur Tengah, serta akan terus diperluas ke negara anggota APEC lainnya.

“Selain itu di dalam APEC ini ada China, ada Amerika Serikat, jadi ini juga menjadi dua pasar yang sangat strategis buat Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota ABAC sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani menambahkan bahwa Indonesia juga mengawal sejumlah agenda legacy, termasuk inisiatif karbon yang berkaitan dengan pembiayaan keberlanjutan serta memanfaatkan berbagai side event untuk mempromosikan peluang investasi dan perdagangan, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ini satu kesempatan yang bisa dioptimalkan untuk kerja sama antar-negara Asia Pasifik juga. Kami juga disini mengambil kesempatan kalau ada event seperti ini. Tentunya Indonesia lebih banyak bisa menarik dari sisi investasi maupun perdagangan,” kata Shinta.

Lebih lanjut, Anggota ABAC Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum Bidang BUMN Kadin Indonesia Kartiko Wirjoatmodjo atau biasa disapa Tiko, menjelaskan bahwa pada jalur pembahasan keuangan terdapat empat fokus utama, yakni integrasi sistem pembayaran, pergerakan modal swasta, pengembangan mata uang digital, serta pembiayaan berkelanjutan dan inklusi keuangan.

“Dan di Indonesia, saya rasa untuk sustainable finance khususnya financial inclusion sangat maju ya. Karena kita punya program seperti KUR dan (PNM) Mekaar yang memang bisa jadi contoh untuk negara lain untuk poverty alleviation (mengentaskan kemiskinan),” kata Tiko.

Sementara itu Ketua ABAC 2026 Li Fanrong menekankan pentingnya tema ABAC 2026 yakni “Openness, Connectivity, Synergy” dalam lingkungan global saat ini. Menurut Li, tema ABAC ini ditujukan guna menjawab ketidakpastian global yang turut membayangi dunia usaha di kawasan Asia – Pasifik.

“Prinsip-prinsip ini bukanlah cita-cita abstrak, melainkan keharusan praktis untuk mempertahankan pertumbuhan, memperkuat rantai pasok, dan memastikan kawasan ini terus berfungsi sebagai penggerak kemakmuran ekonomi global,” kata Li Fanrong

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani (empat dari kiri) yang juga merupakan Anggota ABAC Indonesia berfoto bersama Ketua ABAC Li Fanrong (lima dari kiri), Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (empat dari kanan) yang juga merupakan Ketua ABAC Indonesia, serta Wakil Ketua Umum Bidang BUMN Kadin Indonesia Kartika Wirjoatmodjo (kanan) yang juga merupakan Anggota ABAC Indonesia di sela-sela acara Press Conference ABAC Meeting I 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta (07/02/2026).

Dengan mengusung tema “Openness, Connectivity, Synergy”, komunitas bisnis se-Asia-Pasifik mempertegas komitmen mereka terhadap pasar terbuka dan integrasi kawasan. Inovasi kolaboratif pun diposisikan sebagai pilar utama demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai pembuka dari rangkaian pertemuan tahun ini, agenda ABAC Meeting I menetapkan arah strategis yang berfokus pada solusi bisnis praktis untuk memperkuat ketahanan dan kemakmuran jangka panjang di kawasan.

Dalam penyelenggaraannya, ABAC Meeting I 2026 membahas 5 topik utama terbagi dalam 4 working group dan 1 task Force, yaitu Working Group I Regional Economic Integration yang dipimpin oleh Anna Curzon (ABAC Selandia Baru), Working Group II Sustainability yang dipimpin oleh Julia Torreblanca (ABAC Peru), Working Group III Digital and Innovation yang dipimpin oleh Janet De Silva (ABAC Kanada), Working Group IV Connectivity yang dipimpin oleh Zeng Qi (ABAC China) dan Task Force Finance and Economics.

Seluruh pembahasan dalam rapat tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan (policy recommendations) yang akan disampaikan kepada pemerintah negara-negara APEC dan para Pemimpin Ekonomi APEC pada akhir rangkaian pertemuan nanti di China.

Setelah pertemuan di Jakarta, rangkaian ABAC 2026 akan dilanjutkan dengan ABAC Meeting II di Mexico City, Meksiko (22–25 April 2026), ABAC Meeting III di Pattaya, Tailan (7–10 Juli 2026), dan ABAC Meeting IV di Shenzhen, China (14-16 November 2026).

Acara ABAC Meeting I 2026 ini disponsori oleh Sinarmas, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), HARUM energy, BYD, PT Bank Mandiri (Persero), dan LESSO. Dengan mitra strategis yaitu RGE (Royal Golden Eagle) Group dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek Group) , serta didukung oleh Bluebird Group, Alun Alun Indonesia, Sarinah, Mustika Ratu, dan PT. VKTR Teknologi Mobilitas Tbk.

GALERI ABAC

01

Ketua ABAC, Li Fanrong memberikan sambutannya pada saat Welcome Reception ABAC Meeting I 2026 di Jakarta, (7/2/2026).

02

Sesi foto Ketua dan Anggota ABAC di acara Welcome Reception ABAC Meeting I 2026 di Jakarta, (7/2/2026).

03

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartoto menyampaikan presentasi saat acara pembukaan ABAC Meeting I 2026 di Jakarta, (7/2/2026).

04

Ketua ABAC, Li Fanrong memimpin jalannya acara Opening Chairs Meeting ABAC Chair 2026, di Jakarta, (7/2/2026).

05

Suasana acara Opening Plenary ABAC Meeting I 2026 di Jakarta, (7/2/2026).

06

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie yang juga merupakan Ketua ABAC Indonesia menyampaikan sambutannya dalam Opening Plenary ABAC Meeting I 2026 di Jakarta, (7/2/2026).

07

Corporate Banking Director PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Riko Tasmaya saat menyampaikan sambutannya dalam acara Themed Launch ABAC Meeting I 2026 di Jakarta, (7/2/2026).

08

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia, Bernardino Vega saat memandu diskusi di acara Themed Launch ABAC Meeting I 2026 di Jakarta, (7/2/2026).

09

Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Hendra Yusran Siry menyampaikan presentasinya dalam acara Themed Lunch ABAC Meeting I 2026 di Jakarta, (8/2/2026).

10

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani yang juga merupakan anggota ABAC Indonesia saat memberikan sambutan pada acara Themed Lunch ABAC Meeting I 2026 di Jakarta, (8/2/2026).

11

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie yang juga merupakan Ketua ABAC Indonesia menyambut Menteri Luar Negeri RI, Sugiono saat Gala Dinner ABAC Meeting I 2026 di Jakarta, (8/2/2026).

12

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono (lima dari kiri) dan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono berfoto (enam dari kiri) berfoto bersama anggota ABAC saat menghadiri Gala Dinner ABAC ABAC Meeting I 2026 di Jakarta, (8/2/2026).

13 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto (dua dari kiri) didampingi Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (dua dari kanan) yang juga merupakan Ketua ABAC Indonesia, Wakil Ketua Umum Bidang BUMN Kadin Indonesia Kartika Wirjoatmodjo (kanan), serta Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani (kiri) yang juga merupakan Anggota ABAC Indonesia, saat memberikan keterangan pers setelah Opening Ceremony ABAC Meeting I 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta (07/02/2026).

14 Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (kiri) yang juga merupakan Ketua ABAC Indonesia saat memberikan keterangan pers didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani dan Wakil Ketua Umum Bidang BUMN Kadin Indonesia Kartika Wirjoatmodjo (kanan) usai penyelenggaraan ABAC Meeting I 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta (09/02/2026).

MEMBERS OF ABAC

Australia

Ms. Michaela Browning
Partner and CEO Asia Pacific
Brunswick Group

Ms. Gabrielle Costigan
Group Managing Director, Business Development
BAE Systems

Mr. Philip Dalidakis
Managing Partner
Orizontas

Brunei Darussalam

Pg Aki Ismusafian Pg Hj Ibrahim
Chief Executive Officer
Standard Chartered Bank Brunei

Mr. Hafriz Fayadh Musa
Managing Director
Exceltech Solutions Sdn Bhd

Canada

Ms. Janet De Silva
Canada Co-Chair
Canada-ASEAN Business Council

Mr. Joseph Fung
Managing Partner
Saltagen Ventures

Chile

Mr. Ramón Jara
Director
Antofagasta PLC (UK)
Antofagasta Minerals S.A.

Ms. Mónica Retamal
Executive Director
Kodea Foundation

Mr. Cristian Lefevre
President
EY Chile

China

Mr. Li Fanrong
Chairman
Sinochem Holdings Corporation

Ms. Zeng Qi
Vice President
CITIC Group Corporation

Dr. Zeng Yuqun
Chairman
Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)

Hong Kong, China

Ms. Mary Huen
Chief Executive Officer
Hong Kong and Greater China & North Asia
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

Ms. Nisa Leung
Managing Partner
Aulis Capital

Ms. Marjorie Yang
Chairman
Esquel Group

Indonesia

Mr. Anindya N. Bakrie
Chief Executive Officer
PT. Bakrie & Brothers Tbk

Ms. Shinta Kamdani
Owner and Chief Executive Officer
Sintesa Group

Mr. Kartika Wirjoatmodjo
President Director
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Japan

Mr. Mitsuhiro Furusawa
President of Institute for Global Financial Affairs
Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Mr. Junichiro Ikeda
Director, Chairman of the Board
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

Mr. Hidenori Furuta
Non-Executive Chairman
Fujitsu Limited

Korea

Mr. Hyun-sang Cho
Vice Chairman
HS Hyosung Group

Mr. Joowan Lee
CEO
Megazone Cloud Corporation

Mr. Kyuho Lee
Vice Chairman and CEO
Kolon Corporation

Malaysia

Datuk Ruben Emir Gnanalingam
Executive Chairman
Westports Holdings Berhad

YBhg. Dato' Hazimah Zainuddin
Group Executive Chairman
Hyrax Oil Sdn. Bhd.

Mr. Yeoh Keong Hann
Executive Director
YTL Power International Berhad

Mexico

Mr. Sergio Ley
Partner and Member of the Board
Grupo Ley

Mr. Guillermo Miller
International Affairs Vice President
Mexican Chemical Manufacturers Association (ANIQ)

Mr. Francisco Suarez
Public Affairs and Strategic Relations General Director
Fomento Económico Mexicano, S.A.B de C.V(FEMSA)

New Zealand

Ms. Anna Curzon
Independent Director
Kiwibank

Mr. Brett O'Riley
Managing Director
OCGL

Ms. Sarah Ottrey
Chair
Christchurch Airport and Whitestone Cheese Company

Papua New Guinea

Mr. James Gore
Managing Partner
Gore Consulting

Mr. Isikeli Taureka
CEO
Turra Holdings Limited

Mr. Chey Scovell
Chief Executive Officer
Manufacturing Council of PNG

Peru

Mr. Alfonso Bustamante
CEO
CFI Holdings S.A.

Mr. Guillermo Ferreyros
Chief Executive Officer
OIG Peru

Mrs. Julia Torreblanca
Vice President of Corporate Affairs
Sociedad Minera Cerro Verde

Philippines

Mr. Sabin M. Aboitiz
President and CEO
Aboitiz Group of Companies

Mr. Tomas Alcantara
Director
Alsons Consolidated Resources, Inc.

Ms. Joanne de Asis
Chairperson
Globe Capital Partners LLC

Russian Federation
Mr. Oleg V. Deripaska
Chairman of the Supervisory Board
Volnoe Delo Foundation

Mr. Kirill Dmitriev
Chief Executive Officer
Russian Direct Investment Fund

Mr. Andrey L. Kostin
Chairman and CEO

Singapore

Mr. Kok Ping Soon
Chief Executive Officer
Singapore Business Federation

Mr. Wong Wai Meng
Chief Executive Officer (Data Centres)
Keppel Data Centres

Mr. Han Kwee Juan
Group Executive and Group Head of Institutional Banking
DBS Bank

Chinese Taipei

Dr. Ted Chang
Chief Technology Officer
Quanta Computer

Mr. Jason Chen
Chairman and CEO
ACER Inc.

Mr. Jamie C. Lin
President
Taiwan Mobile

Thailand

Mr. Kobsak Duangdee
Secretary-General
Thai Bankers Association

Mr. Kasemsit Pathomsak
Executive Chairman
Merchant Partners Limited

Mr. Kriengkrai Thiennukul
Chairman
The Federation of Thai Industries

USA

Mr. Alfred Landon Loomis
President
Boeing China

Hon. Bimal Patel
General Counsel
Paypal

Viet Nam

Mr. Dang Thanh Tam
Chairman
Saigon Invest Group

Dr. Nguyen Thanh Hung
Founder and Chairman
Sovico Group

Dr. Ho Sy Hung
Chairman
Viet Nam Chamber of Commerce and Industry

APF CANADA HADIRKAN PEMIMPIN APEC DI JAKARTA UNTUK PERKUAT KEUANGAN DIGITAL UMKM PEREMPUAN

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kadin Indonesia dan Asia Pacific Foundation of Canada mengenai Kemitraan dalam pelaksanaan Analisis dan Strategi kebijakan luar negeri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie bersama Presiden dan CEO APF Canada Jeff Nankivell di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Jumat (06/02/2026).

6 Februari 2026 – JAKARTA – Asia Pacific Foundation of Canada (APF Canada) hari ini menghimpun para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan pemangku kepentingan kawasan dalam lokakarya publik–swasta tingkat tinggi bertajuk "Connecting Policy, Business & People: Digital Finance and Market Readiness for Inclusive MSMEs", yang diselenggarakan di sela-sela pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) I di Jakarta.

Diselenggarakan di Hotel Shangri-La Jakarta, workshop ini mempertemukan para anggota ABAC, pejabat senior pemerintah, perwakilan Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor-Leste, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, organisasi pendukung UMKM, serta para undangan dari seluruh kawasan APEC untuk memperkuat dialog mengenai perumusan kebijakan UMKM yang inklusif dan responsif gender.

Direktur Eksekutif APEC, Eduardo Pedrosa, dalam sesi pembukaan Dialog ABAC–SOM menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menyoroti berbagai isu kunci terkait UMKM dan digitalisasi.

Ia menilai kegiatan ini menjadi contoh kuat dari keterlibatan publik–swasta yang efektif dalam mendorong reformasi kebijakan guna mendukung pengembangan UMKM di seluruh kawasan APEC.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Fase Kedua APEC-Canada Growing Business Partnership (ACGBP) — inisiatif lima tahun senilai 2,5 juta dolar Kanada yang didanai Pemerintah Kanada dan diimplementasikan oleh APF Canada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan fokus khusus pada perempuan dan wirausaha perempuan muda.

"UMKM yang dipimpin perempuan merupakan pendorong penting inovasi, produktivitas, dan ketahanan di seluruh perekonomian APEC," ujar Jeff Nankivell, Presiden dan CEO APF Canada.

"Lokakarya ini mencerminkan komitmen kami untuk menghubungkan kebijakan, dunia usaha, dan masyarakat guna memastikan keuangan digital serta akses pasar dapat dimanfaatkan oleh mereka yang selama ini sering tertinggal."

Memperkuat UMKM Perempuan dalam Rantai Nilai Regional

Ketua ABAC Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi konsistensi mitra dari Kanada yang selama bertahun-tahun berfokus pada pengembangan UMKM serta pemberdayaan perempuan. Menurutnya, fokus tersebut sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki sekitar 60 juta pelaku UMKM, dengan lebih dari setengahnya merupakan perempuan.

“Perlu saya sampaikan bahwa jika berbicara UMKM di Indonesia jumlahnya sekitar 60 juta, dan lebih dari setengahnya adalah perempuan,” katanya.

Anindya juga menekankan pentingnya peningkatan akses pasar, dukungan likuiditas, serta model bisnis yang lebih adaptif agar pelaku usaha perempuan dapat berkembang lebih cepat.

“Untuk membantu perempuan, dibutuhkan akses pasar yang lebih baik, dukungan likuiditas yang lebih besar, dan kita harus mendesain model bisnis yang benar-benar memudahkan mereka untuk mengadopsinya,” kata Anindya.

Mendukung Agenda Pertumbuhan Inklusif APEC

Lokakarya ini secara langsung mendukung komitmen APEC terhadap kesetaraan gender dan pertumbuhan inklusif di bawah La Serena Roadmap for Women and Inclusive Growth (2019), khususnya dalam memperluas akses perempuan wirausaha terhadap pembiayaan dan pasar, memperkuat kepemimpinan UMKM, serta mendorong perumusan kebijakan berbasis data dan bukti.

“Dengan mendasarkan dialog kebijakan pada realitas dunia usaha, kita dapat menghasilkan solusi UMKM yang lebih efektif dan responsif gender,” tambah Vina Nadjibulla, Wakil Presiden APF Canada.

Melalui kolaborasi berkelanjutan dengan ABAC Kanada, ABAC Indonesia, dan mitra regional, APF Canada menargetkan hasil lokakarya ini dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperluas akses pembiayaan digital dan rantai pasok bagi UMKM yang dipimpin perempuan di Indonesia dan kawasan APEC.

Di sela-sela lokakarya, APF Canada dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) baru yang mencerminkan semakin eratnya kerjasama Kanada–Indonesia pada persimpangan kebijakan, riset, dan keterlibatan dunia usaha. MoU yang ditandatangani di Jakarta oleh Jeff Nankivell, Presiden dan CEO APF Canada, serta Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia, membentuk kerangka kerja kolaborasi yang lebih erat dalam analisis kebijakan luar negeri, strategi perdagangan dan komersial, serta riset terapan di bidang kepentingan bersama.

Melalui kemitraan ini, kedua organisasi akan bekerja sama dalam pertukaran pengetahuan, pelaksanaan riset bersama, serta penyelenggaraan dialog kebijakan mengenai berbagai isu seperti mineral kritis, ketahanan pangan dan energi, serta implementasi efektif perjanjian ekonomi Kanada–Indonesia, guna mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti serta memperkuat kerja sama bilateral dan regional.

Kadin Provinsi Sumut Resmikan 3 SPPG MBG, Dorong Ekosistem Usaha dan Lapangan Kerja Baru

Peresmian 3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto (tiga dari kanan), Kepala Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta WIjaya (dua dari kanan), Koordinator Kadin Daerah Satgas MBG Gotong-Royong Kadin Indonesia Desi Arianti (empat dari kiri), Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Sumut Diaz Wardianto (empat dari kanan) pada Kamis (05/02/2026).

Medan – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumatra Utara (Sumut) resmikan tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah naungan Yayasan Pembinaan dan Pelatihan Vokasi Kadin Provinsi Sumut, Kamis (05/02/2026).

Ketiga SPPG tersebut masing-masing berlokasi di Medan Amplas, Limau Mungkur Kota Binjai, serta Aek Buaton Kabupaten Padang Lawas.

Kepala Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta Wijaya menyampaikan bahwa Kadin Indonesia secara konsisten mendorong peran aktif pengusaha daerah dalam menyukseskan program MBG melalui pendirian dapur-dapur SPPG yang profesional dan berkelanjutan.

“Kadin Indonesia melihat MBG sebagai peluang strategis untuk membangun ekosistem usaha baru. SPPG bukan hanya dapur produksi, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal,” kata Chandra.

Menurutnya, kolaborasi Kadin Indonesia dengan Kadin Provinsi Sumut menjadi contoh konkret sinergi dunia usaha dalam mendukung program pemerintah. Ia berharap model SPPG di Sumut dapat direplikasi di daerah lain.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Sumut Firsal Dida Mutyara mengatakan bahwa peresmian tiga SPPG tersebut menjadi bukti komitmen Kadin Provinsi Sumut dalam mendukung program MBG sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. “SPPG yang diresmikan hari ini bukan sekadar tempat produksi makanan bergizi, tetapi simbol kekuatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan dan inovasi,” ujarnya.

“SPPG yang diresmikan hari ini bukan sekadar tempat produksi makanan bergizi, tetapi simbol kekuatan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan dan inovasi,” ujarnya.

Firsal menambahkan, dapur MBG diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja baru. Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh tim MBG yang telah berkontribusi mewujudkan program tersebut.

“Kami berharap MBG terus berkembang dan menjadi salah satu ikon program terbaik di Indonesia yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa program MBG harus memberi dampak ganda, tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga perekonomian daerah.

“Program MBG ini jangan hanya dipandang sebagai program sosial, tetapi harus menjadi penggerak ekonomi lokal. SPPG harus melibatkan UMKM, petani, serta tenaga kerja setempat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Bima.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Koordinator Kadin Daerah Satgas MBG Gotong-Royong Kadin Indonesia Desi Arianti, Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Sumut Diaz Wardianto, Kepala SPPG Medan Wilayah Sumut Donald Simanjuntak, dan Kepala SPPG Medan Amplas, Qory.

Kadin Indonesia dan Perum Perumnas Menandatangani Nota Kesepahaman Dukung Program Perumahan Nasional

Peresmian 3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto (tiga dari kanan), Kepala Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia Chandra Tirta WIjaya (dua dari kanan), Koordinator Kadin Daerah Satgas MBG Gotong-Royong Kadin Indonesia Desi Arianti (empat dari kiri), Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Sumut Diaz Wardianto (empat dari kanan) pada Kamis (05/02/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Strategis dalam Mendukung Program Perumahan Nasional yang berlangsung di Samesta Mahata Tanjung Barat, Jakarta Selatan pada Jumat (20/02/2026).

MoU dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan Plt. Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara BUMN sektor perumahan dan dunia usaha nasional guna mempercepat penyediaan hunian yang terjangkau, berkelanjutan, dan inklusif bagi masyarakat Indonesia.

Dalam MoU tersebut, Para Pihak sepakat menjajaki berbagai ruang lingkup kerja sama, antara lain:

- Program pendanaan dan skema pembiayaan perumahan, termasuk fasilitasi pendanaan dari dalam dan/atau luar negeri;
- Edukasi, sosialisasi, dan pemasaran Program Business-to-Business (B2B) Home Ownership Program (HOP) Perumnas kepada anggota dan afiliasi Kadin;
- Pemberian harga jual khusus dan insentif penjualan bagi anggota Kadin;
- Kolaborasi pemanfaatan dan pengembangan lahan;
- Penguatan ekosistem perumahan melalui dukungan kebijakan dan kemudahan regulasi untuk menjaga keseimbangan sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand).

Sesi foto bersama jajaran Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan Perum Perumnas usai acara penandatangan MoU dan sosialisasi Home Ownership Program (HOP) hunian Perumnas, di Samesta Mahata Tanjung Barat, Jakarta Selatan pada Jumat (20/02/2026).

WKUK Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata peran aktif Kadin Indonesia dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya di sektor perumahan dan pembangunan kewilayahan.

Hal ini kata Carmelita, tidak lepas dari peran sektor perumahan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi, karena memiliki dampak berantai yang luas terhadap berbagai sektor industri, seperti industri konstruksi, material bangunan, sektor pembiayaan, hingga penciptaan lapangan kerja.

“Untuk itu, melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan kebutuhan hunian anggota dan ekosistem dunia usaha dapat terhubung secara efektif dengan produk dan program Perumnas,” Carmelita.

Sementara itu, Plt. Direktur Utama Perum Perumnas Imelda Alini Pohan menegaskan bahwa kemitraan dengan Kadin Indonesia membuka peluang perluasan akses pasar serta inovasi skema pembiayaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pekerja dan pelaku usaha.

Kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun ekosistem perumahan yang lebih terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sisi pembiayaan, peningkatan akses kepemilikan hunian, serta optimalisasi potensi kolaborasi antara BUMN dan dunia usaha, lanjutnya.

Selain itu, akan dilakukan juga Home Ownership Program (HOP) hunian Perumnas kepada anggota, karyawan, atau afiliasi Kadin Indonesia melalui berbagai agenda dan forum yang disepakati bersama. Untuk meningkatkan daya tarik program, Perumnas juga memberikan harga jual khusus atas produk hunian bagi anggota dan afiliasi Kadin, serta insentif penjualan apabila terjadi realisasi transaksi melalui jaringan Kadin.

MoU ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak. Ketentuan teknis dan komersial akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri.

Melalui penandatanganan ini, Kadin Indonesia dan Perumnas berharap tercipta model kolaborasi yang tidak hanya memperluas akses kepemilikan hunian, tetapi juga memperkuat ekosistem perumahan nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro, WKU Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kadin Indonesia Dhony Rahajoe, WKU Bidang Pengembangan Potensi Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia Sharmila Yahya, Ketua Pengurus Kadin Indonesia Institute Mulya Amri dan Direktur Manajemen Risiko & Legal Perumnas Nixon Sitorus.

LUAR NEGERI

James Riady: Tidak Cukup Alasan untuk Tidak Optimistis Memasuki Tahun 2026

Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Bidang Luar Negeri, James Riady menyampaikan sambutannya dalam acara Kadin Indonesia Diplomatic–Economic Breakfast yang diselenggarakan di Museum Nasional, Jakarta, Jumat (13/02/2026).

JAKARTA—Tidak cukup alasan bagi bangsa Indonesia untuk tidak optimistis memasuki tahun 2026. Di tengah lingkungan global yang menantang, kinerja ekonomi nasional justru menunjukkan perbaikan signifikan. Pada 2025, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11%, tertinggi di antara negara-negara Group of Twenty (G20). Bahkan pada kuartal keempat 2025, pertumbuhan ekonomi menembus 5,39%, tertinggi sejak periode pemulihan pascapandemi Covid-19.

Memasuki tahun 2026, sejumlah program Presiden Prabowo Subianto, khususnya pembangunan tiga juta rumah dan program makan bergizi gratis (MBG), mulai menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Otoritas fiskal juga telah menyatakan tekad untuk mempercepat pencairan anggaran belanja APBN 2026 sejak awal kuartal pertama.

“Jika kita melihat berbagai indikator ekonomi, tidak ada alasan yang cukup kuat bagi kita untuk tidak optimistis memasuki 2026. Kita memasuki tahun ini dengan fondasi ekonomi yang kuat dan kondisi fiskal yang sehat,”.

kata James Riady, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Luar Negeri, dalam acara Kadin Indonesia Diplomatic–Economic Breakfast di Museum Nasional, Jakarta, Jumat (13/02/2026).

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, para direktur jenderal dari sejumlah kementerian, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega, WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin Indonesia Pahala Mansury, jajaran Ketua Komite Bilateral dan Komite Tetap Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, serta para Ketua Kadin Daerah. Kegiatan ini merupakan agenda bulanan Kadin di bawah koordinasi WKUK Bidang Luar Negeri James Riady.

Momentum Pertumbuhan yang Konsisten

Selama empat kuartal 2025, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren perbaikan yang konsisten dari kuartal pertama hingga mencapai puncaknya pada kuartal keempat. Pada periode tersebut, pertumbuhan melonjak hingga 5,39%. Salah satu faktor pendorongnya adalah kenaikan belanja pemerintah yang pada kuartal itu meningkat hingga 44%.

“Ini momentum yang sangat baik sekaligus prestasi yang patut disyukuri. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara anggota G20,” ujar James.

Pertumbuhan 5,39% pada kuartal keempat 2025 merupakan yang tertinggi sejak 2022, saat Indonesia mengalami rebound dari pandemi. Tren ini diyakini berlanjut pada 2026. Perkembangan di lapangan juga menggembirakan.

Para peritel aktif mencari lokasi untuk membuka gerai baru, kawasan perbelanjaan kembali mencatat peningkatan permintaan, banyak sektor melaporkan kinerja kuat pada kuartal keempat, dan aktivitas bisnis pada Januari tetap solid. Permintaan domestik, tegasnya, tetap hidup dan sehat.

Masifnya Pembangunan Perumahan

Memasuki 2026, sejumlah program pemerintah khususnya pembangunan tiga juta rumah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan hasil positif. Menurut James, publik kini menyaksikan penggerak pertumbuhan struktural yang signifikan.

“Salah satu yang paling penting adalah inisiatif pembangunan perumahan skala besar dari pemerintah. Indonesia masih menghadapi defisit perumahan yang cukup besar,” ujarnya.

Program tersebut bertujuan memberikan jutaan keluarga yang belum memiliki rumah kesempatan nyata untuk memilikinya.

“Ini bukan sekadar program sosial, melainkan mesin ekonomi yang sangat kuat untuk menggerakkan pertumbuhan dan pemerataan,” tambahnya.

Dorongan pembangunan perumahan yang berkelanjutan akan menciptakan lapangan kerja dalam skala besar, mendorong sektor konstruksi, bahan bangunan, logistik, dan jasa keuangan, serta berpotensi menambah 1%–1,5% terhadap pertumbuhan PDB. Sektor perumahan memiliki dampak langsung dan cepat terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Membangun Kepercayaan

James menegaskan bahwa fondasi pertumbuhan ekonomi tidak hanya dibangun oleh angka makro dan kebijakan fiskal, tetapi juga oleh kepercayaan antarbangsa “Perdagangan mengikuti kepercayaan. Dan kepercayaan berawal dari saling pengertian. Dan budaya adalah tempat di mana pengertian itu dimulai,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum kontrak ditandatangani, sebelum investasi direalisasikan, dan sebelum pabrik dibangun, bangsa-bangsa harus belajar untuk saling memahami dan saling menghormati.

a mengingatkan bahwa Indonesia memasuki 2026 di tengah dunia yang berubah cepat. Pertumbuhan global tidak merata, pola perdagangan dibentuk ulang, rantai pasok direorganisasi, dan arus modal semakin selektif. Namun sejarah menunjukkan bahwa periode penyesuaian global juga melahirkan peluang baru, terutama bagi negara yang menawarkan stabilitas, skala ekonomi besar, dan kemitraan kredibel.

Bagi Indonesia, pertanyaannya bukan apakah dunia berubah, tetapi bagaimana kita memposisikan diri secara jelas dan kredibel di tengah perubahan itu,” kata James.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia baru-baru ini melakukan pembahasan konstruktif dengan sejumlah mitra utama dan menantikan penandatanganan perjanjian perdagangan penting dengan Amerika Serikat pada 19 Februari di Washington, D.C. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap Indonesia sebagai mitra ekonomi yang stabil dan andal.

Dengan arus investasi yang relatif stabil, membaiknya kondisi komoditas, konsumsi domestik yang kuat, serta program belanja pemerintah yang lebih akseleratif, seluruh komponen utama PDB bergerak mendukung pertumbuhan berkelanjutan pada 2026.

“Optimisme kita bukan optimisme emosional. Ia bersifat struktural, berbasis data, dan berakar pada aktivitas ekonomi nyata di lapangan,” tegasnya.

Foto Bersama perwakilan negara yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri, James T. Riyadi, Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha dalam acara Kadin Indonesia Diplomatic-Economic Breakfast di Museum Nasional, Jakarta, Jumat (13/02/2026).

Diplomasi Budaya dan Ekonomi

Namun James mengingatkan, optimisme saja tidak cukup. Tantangannya adalah menerjemahkan stabilitas menjadi kesejahteraan bersama dan kemitraan nyata. Masa depan pertumbuhan Indonesia tidak ditentukan hanya di ruang konferensi, tetapi di kawasan industri, destinasi pariwisata, wilayah pertanian, dan kota-kota sekunder yang tumbuh di seluruh nusantara.

Ia juga menyoroti pentingnya dimensi budaya dan kehadiran Wakil Menteri Kebudayaan dalam forum tersebut. Budaya, katanya, bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga pariwisata, industri kreatif, diplomasi kuliner, film, fesyen, musik, dan konten digital. Dalam banyak kasus, budaya menjadi duta pertama sebuah bangsa, jauh sebelum perjanjian perdagangan ditandatangani. Ketika masyarakat saling menghargai budaya, hubungan bisnis menjadi lebih mudah, lebih dalam, dan lebih berkelanjutan.

Diplomasi budaya dan diplomasi ekonomi bukan dua jalur terpisah. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama," ujarnya.

Menutup paparannya, James menegaskan bahwa meskipun dunia penuh ketidakpastian, arah Indonesia tetap jelas: stabilitas politik, pasar domestik yang besar dan terus tumbuh, sumber daya alam strategis, serta komitmen kuat terhadap kemitraan jangka panjang.

Sebagai Kadin, pihaknya berkomitmen menjadi jembatan antara pemerintah dan dunia usaha, antara mitra asing dan pelaksanaan di tingkat lokal, serta antara strategi nasional dan kesiapan daerah. "Terima kasih atas persahabatan, kemitraan, dan kepercayaan Anda kepada Indonesia," tutup James.

Kadin dan Kemlu Gelar Diplomatic Gatherings, Perkuat Promosi Perdagangan dan Investasi

Foto bersama DIplomatic Gatherings yang dihadiri oleh 83 Duta besar/perwakilan negara sahabat yang dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (tengah), Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Deddy Abdi (enam dari kanan), dan Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega di Kantor Kementerian Luar Negeri, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (06/02/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menggelar Diplomatic Gatherings yang berlangsung di Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis (06/02/2026), sebagai upaya memperkuat kolaborasi promosi perdagangan dan investasi Indonesia dengan negara-negara sahabat.

Pertemuan tersebut dihadiri 83 Duta Besar (Dubes) negara sahabat ataupun perwakilannya antara lain dari China, India, Singapura, Malaysia, Tailan, Vietnam, Uni Eropa, Rusia, Turki, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Brasil, Meksiko, dan Mesir.

“Dari sisi Kadin kami sangat nyaman dan berterima kasih untuk kerja sama yang telah diberikan dari Kementerian Luar Negeri. Kami selalu berpikir bagaimana agenda Pak Presiden dan agenda tentunya pemerintah bisa didampingi dengan promosi perdagangan dan investasi. Karena kami bersama persetujuan kami tentu sangat membutuhkan perdagangan dan investasi ini sampai kepada level di Kadin Daerah dan juga tentunya UMKM,” ujar Anin sapaan akrabnya.

Anin menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha telah menghasilkan berbagai kesepakatan internasional yang tidak hanya berhenti pada penandatanganan, tetapi juga pada implementasi kerja sama.

“Dan tadi kita bicara betapa kerja sama ini menghasilkan sesuatu yang baik bukan saja tanda tangannya tapi juga aktivasinya mengenai Uni Eropa, mengenai Kanada, Eurasia, dan masih banyak lagi. Dan tadi juga kita bicara dengan banyak duta besar mengatakan masih banyak lagi yang belum kita eksplorasi,” kata Anin.

Menurut Anin, berbagai sektor baik tradisional maupun modern memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam kerja sama internasional, mulai dari industri padat karya hingga hilirisasi mineral kritis.

“Tradisional seperti tentunya sepatu, garmen, elektronik, furniture, palm oil itu jalan terus. Tapi juga hilirisasi dari mineral kritis seperti *copper*, nikel, bahkan nantinya silika jadi suatu bahan yang dibutuhkan. Baik di barat seperti Amerika (Serikat) maupun Eropa maupun di timur seperti China itu sangat dibutuhkan. Dan ini tidak mungkin kalau kita tidak mendapat dukungan dari pemerintah,” jelas Anin.

Lebih lanjut, Anin juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perdagangan selain peningkatan nilai transaksi.

“Kita ketahui bahwa jumlah perdagangan di Indonesia 2025 itu totalnya itu 10 sampai 50 miliar dolar AS. Nah ini kita ingin tingkatkan tentunya. Tapi bukan hanya tingkatkan jumlahnya tapi juga kualitasnya. Artinya yang mesti lebih dalam dengan produk-produk yang lain yang baik,” tambah Anin.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemlu RI Deddy Abdi menegaskan bahwa kegiatan Diplomatic Gatherings juga menjadi sarana memperkuat jejaring antara dunia usaha dan perwakilan diplomatik negara sahabat.

“Ini juga forum untuk networking. Karena Kadin juga lengkap punya komite-komite bilateral. Tadi duta besar-duta besar dari negara sahabat yang datang juga sangat senang terhadap kolaborasi ini dimana Indonesia menunjukkan efisiensinya antara government dan dunia bisnis itu bisa satu suara,” tutup Deddy.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega, jajaran Ketua Komite Bilateral Kadin Indonesia dan jajaran Ketua Komite Tetap Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia.

Anindya Bakrie Tegaskan Pertumbuhan Hijau sebagai Motor Investasi, Transisi Energi, dan Daya Saing Global

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menjadi pembicara pada sesi panel acara Indonesia Economic Summit (IES) Thought Leadership bertajuk "How Can Indonesia Leverage The Green Sectors to Boost Growth" di Hotel Shangri-La Jakarta pada Rabu (04/02/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa pertumbuhan hijau bukanlah agenda yang berdiri sendiri, melainkan bagian tak terpisahkan dari cerita besar pertumbuhan nasional Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Anin sapaan akrabnya dalam sesi panel di acara Indonesia Economic Summit (IES) Thought Leadership bertajuk "How Can Indonesia Leverage The Green Sectors to Boost Growth" di Hotel Shangri-La Jakarta pada Rabu (04/02/2026).

Menurut Anin, pertumbuhan hijau perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang mencakup aspek pertumbuhan ekonomi, transisi energi, hingga dinamika geopolitik global. Pendekatan tersebut dinilai penting agar Indonesia mampu mengambil peran strategis dalam perubahan lanskap ekonomi dunia.

"Pertumbuhan hijau pada dasarnya bukan sesuatu yang berjalan paralel, tetapi merupakan bagian dari cerita pertumbuhan nasional," ujar Anin.

Anin menjelaskan, setidaknya terdapat tiga dimensi utama dalam pertumbuhan hijau. Pertama, pertumbuhan hijau merupakan cerita tentang pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan investasi, perdagangan, industrialisasi, dan pada akhirnya membuka lapangan kerja. Kedua, pertumbuhan hijau berkaitan erat dengan agenda transisi energi. Ketiga, pertumbuhan hijau juga memiliki dimensi geopolitik yang semakin kuat di tingkat global.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Anin menilai Indonesia perlu menentukan posisi yang jelas dalam rantai pasok dan ekosistem global yang besar. Anin menyebutkan dua sektor utama yang memiliki potensi signifikan untuk mendorong pertumbuhan hijau nasional, yakni elektrifikasi dan hilirisasi mineral.

Foto bersama acara Indonesia Economic Summit (IES) Thought Leadership bertajuk "How Can Indonesia Leverage The Green Sectors to Boost Growth" yang dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (tiga dari kiri), Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo (tiga dari kanan), Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno (kanan), Chief Sustainability Officer of APP Group Elim Sritaba (empat dari kiri), Head of Development & Investment Asia Pacific of Masdar Fatima Alsuwaidi (empat dari kanan) pada Rabu (04/02/2026).

Lebih lanjut, Anin mengungkapkan bahwa elektrifikasi mencakup sekitar 40 persen dari peluang dalam cerita pertumbuhan hijau. Saat ini, sekitar 1,5 persen dari mobil baru yang dijual di Indonesia sudah merupakan kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Meski masih tertinggal dibandingkan China yang penetrasinya mencapai sekitar 90 persen atau Eropa sekitar 60 persen, tren tersebut kata Anin dinilai membuka peluang terbentuknya industri dan ekosistem baru di dalam negeri.

"Ini menciptakan rangkaian industri dan ekosistem yang sama sekali baru. Banyak pelaku usaha, khususnya dari China, yang sudah membangun fasilitas produksinya di Indonesia," kata Anin.

Selain elektrifikasi, sektor hilirisasi mineral kritis juga menjadi fokus utama. Anin menekankan bahwa Indonesia tidak hanya dikenal sebagai produsen nikel dengan kontribusi sekitar 60 persen produksi dunia, tetapi juga memiliki potensi besar pada komoditas lain seperti kobalt, tembaga, dan bauksit.

"Sekitar 10 persen produksi global komoditas tersebut berasal dari Indonesia, dengan aktivitas yang banyak berlangsung di kawasan Indonesia bagian timur, sehingga berpotensi mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional," tutur Anin.

Lebih lanjut, Anin menilai pertumbuhan hijau juga merupakan cerita besar transisi energi. Anin menyoroti meningkatnya kebutuhan energi seiring perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan pusat data (data center).

Dalam 25 hingga 35 tahun ke depan menuju target net zero, Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 100 gigawatt listrik hanya untuk mendukung operasional pusat data" terang Anin.

Dalam konteks tersebut, Anin menyampaikan dukungan terhadap langkah PT PLN (Persero) yang tengah mengembangkan kapasitas pembangkit listrik hingga 75 gigawatt, dengan sekitar 75 persen di antaranya bersumber dari energi terbarukan.

"Untuk mendukung hilirisasi mineral kritis, Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 500 gigawatt energi surya dalam 25 hingga 35 tahun ke depan. Dengan cadangan silika dan sumber daya alam yang dimiliki, peluang ini sangat besar bagi Indonesia," jelas Anin.

Dari sisi geopolitik, Anin menegaskan bahwa isu pertumbuhan hijau dan transisi energi kini menjadi arena persaingan strategis global. Dalam berbagai forum internasional seperti Davos, APEC, dan G20, terlihat bahwa isu transisi energi semakin dominan dibahas oleh negara-negara besar. Saat ini, China dinilai lebih aktif dibandingkan Amerika Serikat dalam mendorong agenda tersebut.

"Indonesia harus sangat cermat dalam memainkan perannya, sambil tetap membuka ruang kerja sama, termasuk dengan negara-negara Timur Tengah yang dapat mendukung dari sisi pendanaan," pungkas Anin.

Hadir narasumber lainnya dalam sesi panel tersebut di antaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo, Chief Sustainability Officer of APP Group Elim Sritaba, Partner at Systemiq Mattia Romani, Head of Development & Investment Asia Pacific of Masdar Fatima Alsuwaidi, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, serta moderator Secretary-General of Global Alliance for A sustainable Planet (GASP), Satya Tripathi.

Ketum Kadin: Perdagangan Indonesia-Australia Berpeluang Naik Tiga Kali Lipat

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (tengah) bersama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega (kiri), Ketua Komite Bilateral Indonesia-Australia Kadin Indonesia George Marantika (kedua dari kiri) pada saat acara Australian Investor Mission Kadin Indonesia Lunch di Hotel Shangri-La Jakarta pada Rabu (04/02/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Novyan Bakrie menilai peluang peningkatan perdagangan antara Indonesia dan Australia masih sangat terbuka. Anidya atau Anin sapaan akrabnya mengungkapkan, sejak penandatanganan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) sekitar lima tahun lalu, nilai perdagangan kedua negara telah meningkat hingga tiga kali lipat. Anin menilai perjanjian Indonesia-Australia CEPA sudah saatnya diperbarui agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika kerja sama yang terus berkembang.

“Saya yakin bisa naik 3 kali lagi bahkan lebih dalam waktu 5 tahun ke depan. Jadi ini suatu contoh buat kerja sama dengan tetangga bisa menghasilkan manfaat yang besar,” kata Anin usai menghadiri acara Australian Investor Mission Kadin Indonesia Lunch di Hotel Shangri-La Jakarta pada Rabu (04/02/2026).

Anin menjelaskan, pertemuan Kadin dengan para calon investor asal Australia membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pemanfaatan sumber daya manusia Indonesia yang berada di Australia, termasuk sekitar 250 ribu mahasiswa serta tenaga kerja migran yang dinilai sangat dibutuhkan.

“Dan ada juga migrant workers atau tenaga kerja migran itu juga sangat dibutuhkan,” terang Anin.
Selain itu, pembahasan juga mencakup penguatan sektor agrikultur, khususnya terkait peluang investasi yang muncul dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dengan ramai-nya program MBG, mereka mempunyai banyak sekali protein dan sayuran yang bukan hanya bisa untuk berdagang tapi juga investasi,” ujar Anin.

Anin menambahkan, sektor mineral kritis seperti tembaga, emas, dan nikel turut menjadi fokus pembahasan. Menurut Anin, produk olahan mineral kritis memiliki peran penting bagi industri elektrifikasi hingga manufaktur stainless steel.

“Saya rasa ini sangat positif dan Kadin sangat mendukung peluang peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan Australia,” pungkas Anin.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega, WKU Bidang Perlindungan Pekerja Migran Kadin Indonesia Nofel Saleh Hilabi, Ketua Komite Bilateral Rusia-Belarusia Kadin Indonesia Didit Ratam dan Ketua Komite Bilateral Indonesia-Australia Kadin Indonesia George Marantika.

Devi Rachmawati: CEPA Indonesia–Kanada Bakal Perkuat Integrasi Sistem Pangan

Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin Indonesia, Devi Erna Rachmawati saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel bertajuk "Mendorong Perdagangan dan Investasi melalui Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)" pada Forum Canada in Asia Conference, di Swiss Hotel Raffles City Convention Centre, Singapura, Senin (10/2/2026).

SINGAPURA — Ketahanan pangan kini tidak lagi dipahami sebatas urusan produksi pertanian, tetapi telah naik kelas menjadi agenda ekonomi strategis yang menyentuh produktivitas nasional, ketahanan rantai pasok, arus investasi, hingga stabilitas ekonomi jangka panjang. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Devi Erna Rachmawati, dalam diskusi panel "Mendorong Perdagangan dan Investasi melalui Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)" pada Forum Canada in Asia Conference, di Swiss Hotel Raffles City Convention Centre, Singapura, Senin (10/2/2026).

"Diskusi ini sangat relevan dan tepat waktu. Ketahanan pangan tidak lagi semata soal produksi, melainkan telah menjadi fondasi ekonomi strategis bagi Indonesia dan Kanada," ujar Devi di hadapan pelaku usaha dan pemangku kepentingan kedua negara.

Devi yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, menjelaskan ketahanan pangan modern mencakup dimensi yang jauh lebih luas: keandalan rantai pasok, keterjangkauan harga, kualitas dan keamanan gizi, keberlanjutan lingkungan, serta kemampuan menghadapi berbagai guncangan—mulai dari perubahan iklim hingga ketidakpastian geopolitik.

Bagi Indonesia, dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan kelas menengah yang terus berkembang, ketahanan pangan berdampak langsung pada pengendalian inflasi, stabilitas sosial, serta daya saing ekonomi. Volatilitas harga pangan, kata dia, selalu menjadi faktor sensitif dalam stabilitas makroekonomi.

Sementara bagi Kanada, menurut Devi, sebagai salah satu pemimpin global dalam produksi pertanian dan inovasi sistem pangan, ketahanan pangan merupakan kekuatan perdagangan sekaligus fondasi kerja sama internasional jangka panjang. "Karena itu, ketahanan pangan menjadi pilar alami dalam kemitraan ekonomi Indonesia–Kanada," tegasnya.

Indonesia, lanjut Devi, mendekati isu ini melalui kerangka Indonesia Incorporated. Dalam model tersebut, pemerintah pusat dan daerah menyediakan arah kebijakan, insentif, dan kepastian regulasi; dunia usaha dan investor mendorong efisiensi dan skala produksi; sementara talenta, lembaga riset, dan wirausaha muda menjadi penggerak inovasi.

Dalam kerangka itu, perdagangan internasional dan investasi asing langsung tidak lagi diposisikan sebagai opsi tambahan, melainkan sebagai kebutuhan untuk memperkuat sistem pangan domestik. Kerja sama dengan Kanada dinilai sejalan dengan pendekatan tersebut, terutama dalam hal akses teknologi, input pertanian berkualitas, dan sistem keamanan pangan.

Canada in Asia Conference diselenggarakan di Swiss Hotel Raffles City Convention Centre, Singapura, pada Senin (10/2/2026).

Agenda Produktivitas dan Investasi

Devi juga menyoroti bahwa ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari agenda produktivitas dan investasi. Pada 2024, total impor agri-pangan dan hasil laut Indonesia mencapai sekitar 39 miliar dolar AS, mencerminkan meningkatnya permintaan pangan berkualitas, urbanisasi, perubahan gaya hidup, serta pertumbuhan industri pengolahan dan jasa makanan.

Dari perspektif bisnis, rantai pasok yang efisien membantu stabilisasi harga dan pengendalian inflasi. Impor yang andal mengurangi volatilitas pasokan akibat risiko iklim. Sementara pengolahan hilir menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah domestik.

Di sisi lain, ekspor ke Kanada mendorong peningkatan standar keberlanjutan, ketertelusuran, dan keamanan pangan. Hal ini membuka peluang bagi UMKM, pelaku usaha pengolahan, serta komunitas pertanian dan perikanan di wilayah pedesaan dan pesisir.

Keberhasilan integrasi sistem pangan, menurut Devi, sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Indonesia memiliki bonus demografi besar, namun masih menghadapi kesenjangan produktivitas, terutama di sektor pertanian dan UMKM pangan.

Kerja sama Indonesia–Kanada dinilai dapat mencakup pertukaran talenta dan riset terapan, pelatihan UMKM untuk memenuhi standar internasional keamanan pangan dan ESG, serta pengembangan startup agri-pangan berbasis anak muda dan perempuan.
“Ketahanan pangan harus dipahami sebagai infrastruktur produktif—setara dengan energi, logistik, dan sistem digital,” katanya.

Platform Integrasi Jangka Panjang

Dalam konteks kelembagaan, Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) menjadi platform strategis untuk memperdalam kemitraan ini. CEPA akan menghapus tarif secara bertahap atas lebih dari 95% ekspor Kanada ke Indonesia, meningkatkan akses pasar bagi produk pangan dan pertanian Indonesia, serta memperkuat kerja sama regulasi, perlindungan investasi, dan integrasi rantai pasok.

Bagi sistem pangan kedua negara, CEPA membuka peluang perdagangan yang lebih terprediksi dan terjangkau, menciptakan insentif investasi bersama, serta memperdalam integrasi rantai nilai agri-pangan Indonesia dan Kanada.

Menutup paparannya, Devi menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu pilar paling strategis dan saling menguntungkan dalam hubungan Indonesia–Kanada.

Dengan memperkuat perdagangan, investasi, inovasi, dan pengembangan SDM, kedua negara berpeluang membangun rantai pasok pangan yang tangguh dan terdiversifikasi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung sistem pangan berkelanjutan dan tahan iklim, serta berkontribusi pada ketahanan pangan regional dan global.

“Dengan pendekatan Indonesia Incorporated dan mitra tepercaya seperti Kanada, kita memiliki peluang nyata untuk melangkah dari sekadar arus perdagangan menuju kemitraan strategis jangka panjang di bidang ketahanan pangan,” pungkasnya.

Makkah Halal Forum 2026: Titi Khoiriah Tegaskan Peran Strategis Indonesia dalam Ekosistem Halal Global

Kepala Badan Pengembangan Ekonomi Syariah Titi Khoiriah menjadi Panelis Internasional pada acara Makkah Halal Forum 2026 di Makkah Chamber Exhibition and Events Center, kota Makkah, Arab Saudi.

Makkah — Titi Khoiriah mewakili Kadin Indonesia kembali menunjukkan kiprah aktifnya di panggung global dengan menjadi pembicara dalam sesi panel internasional pada ajang bergengsi Makkah Halal Forum 2026. Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin industri, regulator, dan pelaku usaha halal dunia tersebut, Titi menegaskan pentingnya positioning strategis Indonesia dalam membangun dan memperkuat ekosistem halal global.

Dalam paparannya bertajuk *Potensi dan Peran Indonesia pada Global Halal Ecosystem*, Titi Khoiriah menekankan bahwa Indonesia memiliki modal kuat sebagai salah satu key driver pertumbuhan halal dunia. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, pasar domestik yang besar, serta kapasitas industri yang terus berkembang, Indonesia dinilai mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi halal global.

Menurut Titi, terdapat sejumlah faktor kunci yang mendorong akselerasi pertumbuhan tersebut, antara lain penguatan *Mutual Recognition Agreement* (MRA), kerja sama bilateral strategis, diplomasi perdagangan halal, serta integrasi kawasan. Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen dan mitra strategis dalam rantai pasok halal dunia.

Lebih lanjut, Titi menyoroti peran strategis Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) dalam mendorong pertumbuhan halal economy nasional. Kadin Indonesia dinilai memiliki posisi strategi dalam mengintegrasikan halal supply chain dari hulu ke hilir, memperkuat kapasitas pelaku usaha, serta membuka akses pasar global bagi produk halal Indonesia.

"Kadin Indonesia menjadi katalis sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan mitra internasional, sehingga Indonesia dapat bertransformasi menjadi engine of growth dalam Global Halal Economy," ujar Titi dalam sesi diskusi panel.

Partisipasi aktif Titi Khoiriah sebagai speaker dalam forum internasional ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Kadin Indonesia untuk mendorong peran strategis Indonesia pada ekosistem halal global. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi lintas negara, lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem ekonomi syariah dan sektor halal yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat, peran pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia diharapkan semakin solid, baik di tingkat domestik maupun global. Momentum Makkah Halal Forum 2026 menjadi panggung penting untuk mempertegas bahwa Indonesia siap mengambil peran kepemimpinan dalam membangun masa depan industri halal dunia.

Para pembicara dalam sesi panel internasional pada ajang bergengsi Makkah Halal Forum 2026

Pengurus Kadin Jatim 2025-2030 Resmi Dilantik, Anindya Bakrie Tekankan Semangat Indonesia Incorporated dalam Industri Manufaktur dan Agroindustri

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (tiga dari kiri) melantik Ketua Umum Kadin Provinsi Jatim Adik Dwi Putranto beserta jajaran Dewan Pengurus Kadin Provinsi Jatim Periode 2025-2030 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (1/2/2026).

Surabaya – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar pelantikan dan pengukuhan jajaran dewan pengurus masa bakti 2025–2030 yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (1/2/2026).

Sebanyak 400 pengurus yang terbagi dalam 32 bidang usaha resmi dikukuhkan. Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi dunia usaha Jatim untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, menegaskan pentingnya penerapan konsep Indonesia Incorporated yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni semangat gotong-royong dan kolaborasi dunia usaha nasional.
“Bukan hanya maju, tetapi maju bersama. Bukan hanya yang besar menjadi semakin besar, tetapi yang menengah naik kelas, yang kecil menjadi menengah, dan UMKM terus berkembang,” ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya.

Menurut Anin, implementasi Indonesia Incorporated paling nyata tercermin di Jatim yang selama ini menjadi basis industri manufaktur dan agroindustri nasional. Anin menekankan bahwa industrialisasi merupakan kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi.

“Ketika kita berbicara mengenai nilai tambah, maka industrialisasi adalah jawabannya,” kata Anin.
Lebih lanjut, Anin juga menyoroti peran strategis Jatim sebagai lumbung pangan nasional sekaligus basis manufaktur nonmigas. Sekitar 30 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur ditopang oleh sektor industri pengolahan, yang didukung kuat oleh sektor perdagangan dan pertanian berskala besar.

Selain itu lanjut Anin, kekuatan UMKM Jawa Timur yang mencakup sekitar 99 persen unit usaha dinilai menjadi modal besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM tersebut bergerak di berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman, tekstil, alas kaki, hingga perikanan.

Tujuh Prioritas Dukung Ekonomi Daerah

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Jatim Adik Dwi Putranto, menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah menetapkan tujuh fokus utama yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Seluruh fokus tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hingga mencapai 8 persen.

“Kami menargetkan pertumbuhan ekonomi Jatim bisa mencapai 8 persen, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Adik.

Fokus pertama adalah sektor investasi, dengan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja.

Fokus kedua menyasar sektor perdagangan, baik domestik maupun internasional. Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Jatim bersama Kadin telah merencanakan misi dagang ke sembilan provinsi di dalam negeri serta empat negara tujuan luar negeri.

Fokus ketiga, yang dinilai paling krusial, adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurut Adik, kualitas SDM berkontribusi sekitar 60-70 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Oleh karena itu, pengembangan SDM menjadi prioritas utama, terlebih dengan telah dibentuknya Tim Koordinasi Vokasi Daerah oleh Gubernur,” ujar Adik.

Fokus keempat adalah adopsi teknologi dan digitalisasi. Langkah ini dinilai bukan lagi pilihan, melainkan keharusan, khususnya bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing dan naik kelas.

Fokus kelima lanjut Adik, diarahkan pada pengembangan industri hijau dan green jobs. Kadin Jawa Timur bersama Kadin Indonesia telah menyiapkan standar kompetensi green soft skills yang ke depan akan diusulkan sebagai standar nasional.

“Fokus keenam adalah penguatan infrastruktur yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Adapun fokus ketujuh adalah pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, menekankan pentingnya kesinambungan kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha di tengah ketidakpastian global.

“Ini adalah kebersamaan yang selama ini telah terjalin dengan baik dan akan kita lanjutkan, semoga ke depan semakin kuat,” ujarnya.

Emil mengingatkan bahwa konflik geopolitik global telah berdampak langsung terhadap perekonomian dunia. Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus berperan sebagai fasilitator bagi para pelaku usaha.

“Peran pemerintah minimal jangan sampai merepotkan, namun tetap harus mengatur agar ekosistem ekonomi berjalan tertib dan berkelanjutan. Saya yakin ada jejak nyata Kadin Jawa Timur dalam berbagai capaian tersebut,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Aziz Syamsuddin, WKU Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko dan WKU Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro.

Pelantikan Pengurus Kadin DIY, Anindya Bakrie Ungkap Kekuatan Ekonomi DIY Bertumpu pada Manusia dan Budaya

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie resmi melantik dan mengukuhkan Ketua Umum Kadin Provinsi DI Yogyakarta (DIY), GKR Mangkubumi serta jajaran pengurus Kadin DIY periode 2025-2030 di Yogyakarta pada Sabtu (31/01/2026).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus Kadin Provinsi DI Yogyakarta (DIY) periode 2025-2030 yang berlangsung di The Alana Hotel Yogyakarta pada Sabtu (31/01/2026).

Dalam sambutannya, Anin sapaan akrabnya menilai keunikan DIY terletak pada fondasi ekonominya yang bertumpu pada manusia, bukan eksploitasi sumber daya alam.

“Lebih dari 60 persen Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta ditopang sektor jasa, dengan kontribusi besar dari pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, serta ekonomi berbasis budaya dan heritage,” ujar Anin.

Menurut Anin, struktur ekonomi tersebut membuat DIY memiliki daya lenting yang khas dibandingkan banyak daerah lain.

“Ketika dunia menghadapi pergeseran rantai pasok, perubahan pola konsumsi, dan tekanan global yang cepat, ekonomi yang ditopang kualitas manusia, kreativitas, dan budaya cenderung lebih adaptif dan tahan guncangan,” terang Anin.

Anin juga menyebut bahwa tantangan ke depan bukan terletak pada penciptaan sektor baru semata, melainkan pada kemampuan menjaga kualitas sumber daya manusia dan ekosistem kreatif agar tetap relevan dengan perubahan zaman.

“Dalam konteks ini, peran dunia usaha menjadi penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi DIY tetap berbasis nilai, inklusif, dan memberi ruang bagi UMKM serta pelaku ekonomi berbasis budaya untuk terus berkembang,” tutur Anin.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi DIY GKR Mangkubumi usai dilantik menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga menjaga marwah lingkungan melalui investasi hijau.

“Kami berpesan kepada investor yang masuk ke DIY agar tumbuh bersama masyarakat, menerapkan konsep investasi hijau, dan tidak menimbulkan polusi, karena DIY ingin berkembang bersama investor yang sejalan dan berkelanjutan,” tegas GKR Mangkubumi.

Ia pun menambahkan bahwa Kadin Provinsi DIY kini tengah merumuskan program kerja yang selaras dengan visi-misi Presiden dan Pemerintah Daerah untuk memastikan ekonomi wilayah tumbuh secara inklusif.

Lebih lanjut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam pidatonya memberikan perumpamaan filosofis. Sultan mengibaratkan dunia usaha seperti bambu yang harus tetap luwes namun tegak di tengah terpaan angin perubahan global.

Menurut Sultan, Kadin Provinsi DIY harus menjadi simpul kolaborasi yang mampu melahirkan local champion dari sektor pangan, UMKM, hingga ekonomi kreatif.

Sultan menekankan bahwa perubahan dalam sebuah organisasi selalu bermula dari kepemimpinan yang jernih.

“Dunia bergerak sangat cepat, rantai pasok bergeser, dan teknologi berkembang tanpa jeda, namun kemajuan tetap ditentukan oleh kepemimpinan, bukan semata mesin dan modal, melainkan kejernihan akal, ketajaman rasa, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Aziz Syamsuddin, WKU Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, WKU Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro dan Ketua Umum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat Faurani.

Kadin Kalsel Gelar Pembinaan Kepatuhan Badan Usaha terhadap Bisnis dan HAM, Dukung Ekosistem yang Transparan

Foto bersama para peserta kegiatan Pembinaan Kepatuhan Badan Usaha terhadap Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Hotel Rattan Inn, Kota Banjarmasin, Kalsel, Rabu (04/02/2026).

Banjarmasin – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Kementerian Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Kalsel menggelar kegiatan Pembinaan Kepatuhan Badan Usaha terhadap Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Hotel Rattan Inn, Kota Banjarmasin, Kalsel, Rabu (04/02/2026).

Acara ini digelar sebagai upaya mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip bisnis dan HAM serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan perusahaan, asosiasi usaha, serta pemangku kepentingan terkait yang diharapkan dapat memperkuat pemahaman dunia usaha mengenai pentingnya integrasi prinsip HAM dalam operasional bisnis sehari-hari.

Pembinaan ini merupakan bagian dari program Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di sektor bisnis, yang bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha agar aktivitas bisnis dijalankan dengan tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

Melalui program ini, pemerintah bersama dunia usaha berupaya membangun ekosistem bisnis yang bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus mencegah potensi pelanggaran HAM dalam rantai pasok maupun kegiatan operasional perusahaan.

Ketua Komite Tetap (Komtap) Hak Kekayaan Intelektual Kadin Provinsi Kalsel Nita Rosita menyampaikan bahwa pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnisnya menghormati hak asasi manusia dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, kepatuhan terhadap prinsip Bisnis dan HAM juga berkaitan erat dengan perlindungan hak kekayaan intelektual serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

“Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, dunia usaha akan lebih dipercaya dan memiliki daya saing yang kuat,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan dan Koordinasi Eksportir Kadin Indonesia, Frits Novianto Suhendar (dua dari kanan) saat memberikan keterangan kepada pers di sela-sela acara ekspor perdana komoditas arang kelapa ke Tianjin, China pada Selasa (10/02/2026).

Kadin Lakukan Ekspor Perdana Arang Kelapa ke Tianjin Senilai Rp200 Miliar

Batam - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kadin Kabupaten Indragiri Hilir, Kadin Kota Batam, dan Kadin Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan ekspor perdana komoditas arang kelapa ke Tianjin, China pada Selasa (10/02/2026).

Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan dan Koordinasi Eksportir Kadin Indonesia Frits Novianto Suhendar mengatakan, program ekspor ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, sebagai bagian dari upaya konkret menggerakkan dan memperkuat UMKM di daerah.

“Ini adalah kolaborasi yang sangat baik. Program ini betul-betul didorong oleh Ketua Umum Kadin Indonesia (Anindya Novyan Bakrie) karena dampaknya langsung dirasakan UMKM di daerah,” ujarnya.

Frits mengatakan, dalam kontrak tahap awal, total volume ekspor arang kelapa mencapai 36.000 ton, dengan kebutuhan pengiriman sekitar 125 kontainer per bulan. Angka tersebut menunjukkan besarnya permintaan pasar internasional terhadap produk turunan kelapa asal Indonesia.

"Ekspor perdana ini telah resmi direalisasikan bersama mitra dari China, Mr. Ryu," ungkapnya.

Kadin, lanjut Frits, juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha lokal yang terlibat langsung, yang tidak hanya berkomitmen secara organisasi, tetapi juga terjun langsung sebagai penggerak bisnis.

“Terima kasih kepada Mr. Ryu dan seluruh mitra. Ini bukti bahwa kolaborasi lintas kabupaten dan kota bisa berjalan dengan sangat baik,” ujar Frits.

Ketua Komite Tetap Pembinaan dan Penguatan Ekspor Manufaktur dan UMKM Kadin Indonesia Zulfikar H. Pane mengatakan selain arang kelapa, Kadin juga menyiapkan ekspor lanjutan berupa serbuk dan serabut kelapa ke Tianjin. Tahap berikutnya tidak hanya berfokus pada perdagangan, tetapi juga transfer teknologi dari China ke Indonesia.

“Ke depan akan ada pengiriman alat-alat produksi dari China untuk mempercepat pengolahan. Jadi bukan hanya ekspor bahan baku, tapi juga ada peningkatan teknologi pengolahan di dalam negeri,” jelasnya.

Menurut Zulfikar, nilai ekspor arang kelapa dalam satu tahun diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Sementara untuk komoditas serabut kelapa, nilai kontrak masih dalam tahap penghitungan, dengan target total ekspor gabungan mencapai Rp500 miliar pada tahun pertama.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Sertifikasi dan Legalitas ESDM Kadin Indonesia Nurliah menambahkan, program ini juga melibatkan puluhan UMKM berbasis rumah tangga yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, serta melibatkan lintas kabupaten dalam rantai pasok dan produksi.

“Ini benar-benar menyentuh sampai ke kelompok-kelompok rumahan. Dampaknya bukan hanya ekonomi daerah, tapi juga pemberdayaan masyarakat,” ujar Nurliah.

Erwin Aksa Apresiasi Kadin Sultra Bangun SPPG MBG hingga Dorong Hilirisasi Nikel Berkelanjutan

Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara, Anton Timbang memberikan cinderamata kepada Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah (OKP) Kadin Indonesia, Erwin Aksa saat Muprov VIII Kadin Sultra yang berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel Kendari, Sabtu (14/02/2026).

Kendari – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII dengan mengusung tema "Sinergitas Kadin dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Meningkatkan Potensi Unggulan Menuju Indonesia Emas 2045" yang berlangsung di Ballroom Swiss-Belhotel Kendari, Sabtu (14/02/2026).

Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah (OKP) Erwin Aksa Kadin Indonesia yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya peran Kadin daerah dalam menyukseskan program strategis pemerintah pusat.

"Yang paling penting hari ini adalah menyukseskan program pemerintah pusat atau program Presiden, terutama terkait pemberian makan bergizi gratis (MBG)," kata Erwin.

Erwin juga mengapresiasi langkah Kadin Provinsi Sultra yang telah berpartisipasi aktif dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG untuk mendukung kesehatan masyarakat dan UMKM lokal.

Selain program sosial, Erwin juga menekankan pentingnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang lebih baik di provinsi Sultra, khususnya komoditas nikel.

"Proses hilirisasi nikel agar terus diperkuat melalui kolaborasi antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan" kata Erwin.

Ketua Umum Kadin Provinsi Sultra Anton Timbang menambahkan bahwa Muprov merupakan forum tertinggi dalam organisasi Kadin. Ia menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan program hilirisasi pemanfaatan Aspal Buton.

"Aspal Buton adalah aspal terbesar di Indonesia dan telah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp1,49 triliun. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan penggunaannya," ujar Anton.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja dengan tulus dan ikhlas demi membangun daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sultra Rony Yakob Laute yang hadir mewakili Gubernur Provinsi Sultra Andi Sumangerukka menyebut bahwa provinsi Sultra dianugerahi sumber daya alam yang melimpah sehingga memiliki fondasi kuat untuk tumbuh.

"Kita harus mendorong keunggulan kompetitif dan hilirisasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memastikan investasi yang masuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan menyejahterakan rakyat. Hilirisasi harus memberi nilai dan manfaat nyata bagi daerah," terangnya.

Ia berharap Kadin Provinsi Sultra mampu berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Turut hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Keanggotaan Widiyanto Saputro dan WKU Wilayah Kalimantan Andi Yuslim Patawari.

SELAMAT

HUT KE-84
KELOMPOK USAHA BAKRIE

"Aksi nyata untuk Indonesia"

KADIN INDONESIA

SELAMAT HUT KE -51
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI)

"Memperkuat Fondasi Transformasi Digital Ekonomi Perempuan Melalui Sinergi Lintas Sektor Menuju Indonesia Emas 2045"

10 FEBRUARI 2026

Hosted By :

KADIN INDONESIA

APEC Business Advisory Council Meeting I 2026

"Openness, Connectivity, Synergy"

7-9 February 2026 | Jakarta, Indonesia

Sponsored By :

Strategic Partners :

Supported By :

KADIN INDONESIA
BIDANG PEMBINAAN
& KOORDINASI
EKSPORTIR

Frits Novianto Suhendar
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia

Anindya Novyan Bakrie
Ketua Umum Kadin Indonesia

Ir. Mustafa M.M.
Ketua Umum Kadin Kepri

PELEPASAN PERDANA

EKSPOR ARANG BATOK KELAPA

Merupakan Program Kerja **Kadin Indonesia Bidang Pembinaan & Koordinasi Eksportir**

Selasa, **10 Februari 2026**	**Kawasan Industri Sekupang Sungai Harapan No. 8,** Pelabuhan Gorong-Gorong Yanto	**14:00 WIB** - Selesai

Contact Person
Nuke : +62 812-8297-5975

BADAN PANGAN NASIONAL
Hadir & Sukseskan
GPM
GERAKAN PANGAN MURAH KADIN SULAWESI TENGGARA
Dan Dapatkan Pangan
Murah & Berkualitas
EX MTQ KENDARI | 13-14 Februari 2026
08:00 WITA-SELESAI
Dr.H. ANDI AMRAN SULAIMAN
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
MAYJEND TNI (Purn.) ANDI SUMANGERUKKA, S.E.,M.M
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
ANINDYA N BAKRIE
KETUA UMUM KADIN INDONESIA
ANTON TIMBANG
KETUA UMUM KADIN SULTRA
kadinsultra
KADIN | SULTRA
www.kadinsultra.com

ESG GOVERNANCE KADIN-GAPPS INTERNATIONAL AWARDS 2026

REGISTER HERE

FREE WEBINAR | Wednesday 11 February 2026 | Time 13.00 - 15.00 WIB

STRENGTHENING ESG GOVERNANCE FOR SUSTAINABLE BUSINESS:

KADIN–GAPPS INTERNATIONAL AWARDS LAUNCH

Elim Sritaba
Deputy Head for SDGs & ESG

Shinta W. Kamdani
Deputy Vice Chairman for the Coordination of Human Development, Culture, and Sustainable Development

Maria R. Nindita Radyati, PhD.
Chair of the ESG Governance Committee

Tony M. Simmonds
Finance Director of GAPPS

Presented by:

GAPPS

ISA Institute for Sustainability and Agility

SCMP LIVE

Save the Date

China Conference Southeast Asia

10 February 2026
St. Regis Jakarta, Indonesia

Tammy Tam
Publisher, South China Morning Post

Anindya N. Bakrie
Chairman of Kadin Indonesia; CEO of Bakrie & Brothers

H.E. Airlangga Hartarto
Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia

H.E. Hashim S. Djojohadikusumo
Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia for Climate and Energy

The Hon John KC Lee, GBM, SBS, PDSM, PMSM
Chief Executive Government of the Hong Kong Special Administrative Region

Pandu Sjahrir
Chief Investment Officer Danantara

Shinta W. Kamdani
Coordinating Vice Chairwoman of Human Development and Culture at Kadin Indonesia; CEO of Sintesa Group

Hu Hang
Global Partner, CEO of Fosun Health

The Hon Dr Horace Cheung Kwok-kwan, SBS, JP
Deputy Secretary for Justice Government of the Hong Kong Special Administrative Region

The Hon. CY Leung
Vice Chairperson of Chinese People's Consultative Conference

Jeffrey Hendrik
Director of Business Development of Indonesia Stock Exchange

Bernardino M. Vega
Vice Chairman of Foreign Affairs at Kadin Indonesia; CEO of AdaKami

Country Host Partner:

Danantara Indonesia

Strategic Partner:

KADIN INDONESIA

www.chinaconference.asia

KADIN INDONESIA

APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

Bisa ke Luar Negeri Tanpa Visa!

KADIN INDONESIA

ABTC adalah kartu perjalanan pebisnis yang berlaku di negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC sebanyak 19 negara anggota, kecuali Amerika Serikat dan Kanada.

KADIN INDONESIA

APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC) berlaku di 19 negara:

- Australia
- Brunei Darussalam
- Cile
- China
- Filipina
- Hong Kong
- Indonesia
- Jepang
- Korea Selatan
- Malaysia
- Meksiko
- Papua Nugini
- Peru
- Rusia
- Selandia Baru
- Singapura
- Tailan
- Taiwan
- Vietnam

KADIN INDONESIA

Keuntungan Memiliki ABTC:

- Bebas visa untuk negara-negara APEC, kecuali Amerika Serikat dan Kanada
- Bisa menetap 90 hari per kunjungan
- Jalur ekspres VIP di imigrasi bandara

KADIN INDONESIA

Persyaratan Permohonan Surat Rekomendasi APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

1. Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Eksekutif Kadin Indonesia, dilengkapi dengan kop surat perusahaan, data pemohon, tanda tangan pimpinan & stempel Perusahaan
2. Scan paspor pemohon masa berlaku min. 2 tahun
3. Scan KTA Kadin aktif 2026 (nama dalam KTAB harus sama dengan yang mengajukan)
4. Scan NIB perusahaan
5. Scan ABTC terakhir (untuk perpanjangan ABTC)/optional

sekretariat@kadinindonesia.id
cc: selly.kadin@gmail.com

https://trade.layanankadin.id/abtc

KADIN INDONESIA

Layanan *Dokumen Ekspor*

Kadin Indonesia membuka layanan dokumen ekspor, seperti Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO), Certificate of Export Goods, Certificate of Free Sale, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

COO merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor.

Jenis SKA/COO

SKA Preferensi

Jenis SKA/COO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara/kelompok negara tujuan.

SKA Non Preferensi

Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu.

Tahapan Membuat Dokumen Ekspor:

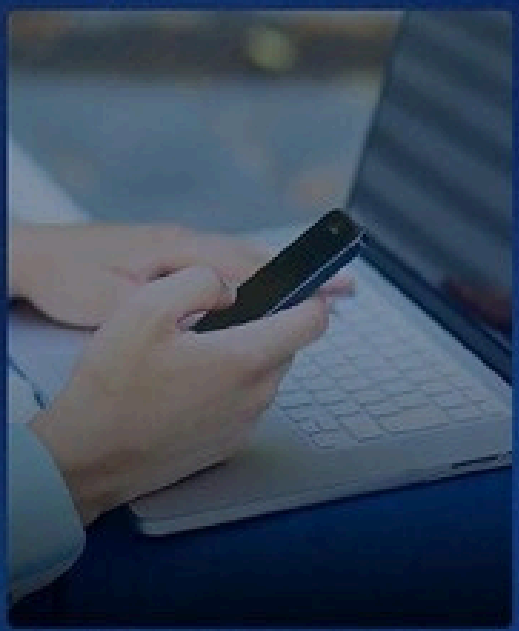

1. Buka *https://trade.layanankadin.id/*
2. Log in atau Mendaftar Akun
3. Melengkapi Data-data perusahaan
4. Melakukan Pembayaran
5. Dokumen siap dicetak dan digunakaan

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

KADIN INDONESIA

Jenis Formulir COO

Form China	Form untuk barang yang termasuk dalam Perjanjian Perdagangan Bebas CHINA-ASEAN yang menggunakan Common Effective Prefential Tarif Scheme yang diekspor ke CHINA - dibutuhkan CoO Kemendag.
Form B	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di Indonesia.
Form B with Notification	Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dengan pemberitahuan.
Form ASEAN-India	Form yang membutuhkan sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan barang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-INDIA - wajib melampirkan SKA Kemendag.
Form A	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang diproduksi di Indonesia, dan memenuhi persyaratan Generalized System of Preferences.
Form D	Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme - wajib melampirkan SKA Kemendag.
Form Textile Product	Form untuk produk tekstil dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan barang diproduksi di Indonesia
Form Certificate of Export Goods	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di banyak negara.
Form Certificate of Free Sale	Form untuk bahan makanan yang diproduksi di Indonesia dan tersedia secara bebas untuk dijual di Indonesia dan pasar luar negeri.

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

KADIN INDONESIA

AYO KITA PAKAI ATA CARNET!

Apa itu ATA CARNET?

- Ata Carnet adalah sistem dan dokumen untuk kegiatan impor/ekspor sementara yang dapat dipergunakan dalam cakupan wilayah 81 negara.
- Carnet merupakan dokumen pabean internasional yang diterima sebagai Pemberitahuan Pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional.
- Secara sederhana, ATA Carnet diistilahkan sebagai "Paspor untuk Barang". Penerapan ATA Carnet dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat prosedur impor dan ekspor sementara sebagai upaya memfasilitasi dunia bisnis internasional.

Siapa Penggunanya?

Digunakan oleh Pebisnis, Teknisi, Penyelenggara pameran, Profesional, baik perorangan atau tim, Kru Film, Ahli Bedah, Arsitek, Seniman, Insinyur, Peneliti, Entertainer, Grup Musik, Tim Olahraga dll

Jenis-Jenis Barang

Penerapan ATA Carnet dilakukan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Izin Masuk/Penerimaan Sementara (Convention On Temporary Admission), Istanbul 1990. Barang-barang yang diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan menggunakan ATA Carnet diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 228 tahun 2014 mengenai Impor Sementara, yaitu barang-barang untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan sejenis;
2. Untuk peralatan profesional atau tenaga ahli;
3. Untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan;
4. Untuk keperluan pribadi wisatawan dan/atau barang yang diimpor untuk tujuan olahraga
5. Untuk tujuan kemanusiaan

Sementara itu, penggunaan ATA Carnet di negara tujuan selain Indonesia disesuaikan dengan aturan masing-masing negara tersebut mengenai penetapan tujuan barang yang menggunakan ATA Carnet.

Masa berlaku ATA Canet : 1 tahun dan tidak bisa diperpanjang

Persyaratan Penerbitan

- Salinan (copy) identitas diri Pemegang Carnet atau yang mewakili
- Surat Kuasa Pemegang Carnet kepada yang mewakili
- Salinan (copy) Kartu Tanda Keanggotaan Kadin
- Salinan (copy) NPWP Perusahaan/Perorangan
- Salinan (copy) NIB Perusahaan
- Dokumen Deskripsi Barang, Foto Berwarna, Keterangan dimensi barang, negara pembuat barang dan harga barang
- Rencana Perjalanan Barang
- Surat Undangan penyelenggaraan dari negara asal
- Menandatangani surat pernyataan bermaterai
- Meletakkan Jaminan

Kontak Pengajuan ATA Carnet
Email: *atacarnet.idn@kadin.id* atau *atacarnetindonesia@gmail.com*
Subjek email: "Pengajuan ATA Carnet" atau "Info ATA Carnet".

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29,
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
atacarnet.idn@kadin.id
atacarnetindonesia@gmail.com

KADIN INDONESIA

ATA carnet

AYO KITA PAKAI ATA CARNET!

Negara-negara yang menerbitkan dan menerima ATA Carnet untuk keperluan ekspor dan impor sementara :

1. Afrika Selatan
2. Amerika Serikat
3. Albania
4. Algeria
5. Andorra
6. Arab Saudi
7. Australia
8. Austria
9. Bahrain
10. Belanda
11. Belarus
12. Belgia
13. Bosnia Herzegovina
14. Bulgaria
15. Chili
16. China
17. Côte d'Ivoire
18. Kroasia
19. Cyprus
20. Denmark
21. Estonia
22. Finlandia
23. Filipina
24. Gibraltar
25. Hongkong
26. Hungaria
27. India
28. Indonesia
29. Inggris
30. Iran
31. Irlandia
32. Islandia
33. Israel
34. Italia
35. Jepang
36. Jerman
37. Kanada
38. Kazakhstan
39. Korea
40. Latvia
41. Lebanon
42. Lithuania
43. Luxemburg
44. Makau
45. Madagaskar
46. Malaysia
47. Malta
48. Maroko
49. Mauritius
50. Makedonia Utara
51. Meksiko
52. Moldova
53. Mongolia
54. Montenegro
55. Norwegia
56. Pakistan
57. Perancis
58. Peru
59. Polandia
60. Portugal
61. Qatar
62. Republik Ceko
63. Rumania
64. Rusia
65. Selandia Baru
66. Senegal
67. Serbia
68. Singapura
69. Slovakia
70. Slovenia
71. Spanyol
72. Sri Lanka
73. Swedia
74. Swiss
75. Thailand
76. Tunisia
77. Turki
78. Ukraina
79. Uni Emirat Arab
80. Vietnam
81. Yunani

Masa berlaku ATA Canet : 1 tahun dan tidak bisa diperpanjang

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29,
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
atacarnet.idn@kadin.id
atacarnetindonesia@gmail.com

Kontak Pengajuan ATA Carnet
Email: *atacarnet.idn@kadin.id* atau *atacarnetindonesia@gmail.com*
Subjek email: "Pengajuan ATA Carnet" atau "Info ATA Carnet".

KADIN INDONESIA

Cara Mendaftar Menjadi Anggota Kadin

Akses Situs Resmi

https://kadin.id/keanggotaan

Tata Cara Daftar Menjadi Anggota Kadin

1 Daftar Akun
Buka **anggota.kadinindonesia.id**

2 Verifikasi Akun
Klik link verifikasi yang dikirimkan ke email anda

3 Isi Data Perusahaan/ Asosiasi
Lengkapi informasi perusahaan atau asosiasi anda

4 Verifikasi oleh Admin
Admin Kadin akan memverifikasi data anda

5 Pembayaran
Lakukan pembayaran melalui sistem anggota Kadin

6 Validasi Pembayaran
Bagian Keuangan Sekretariat Kadin Indonesia akan memvalidasi pembayaran anda

7 Menjadi Anggota Resmi
Setelah divalidasi, anda resmi menjadi anggota! KTA dan invoice dikirimkan ke email anda

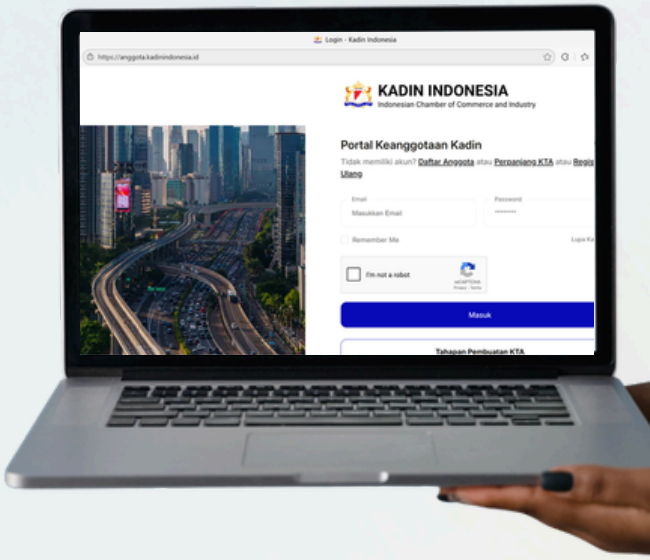

KTA & SBU

Mengapa harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kompetensi, maupun SBU Non-Konstruksi dari Kadin Indonesia?

- KTA dan SBU Kadin dapat **meningkatkan kepercayaan** terhadap perusahaan anda
- Memiliki KTA menunjukkan bahwa **bisnis anda diakui dan terhubung dengan jaringan bisnis yang kuat**
- Kepemilikan KTA Kadin dan SBU dari Kadin **memenuhi kelengkapan prasyarat mengikuti tender pengadaan barang dan jasa**
- KTA dan SBU dari Kadin adalah **dokumen penting bagi perusahaan pemasok barang dan jasa untuk pemerintah atau swasta**
- KTA dan SBU Kadin **menunjukkan standar kualitas, integritas dan kompetensi** yang diperlukan perusahaan untuk melayani pemerintah atau klien swasta

Manfaat Keanggotaan Kadin

- Tumbuhkan bisnis melalui network dan kolaborasi
- Akses terhadap pasar
- Dukungan advokasi
- Akses terhadap transformasi digital
- Scaling up skill/kemampuan wirausaha dan pekerja
- Dukungan dalam penerapan TKDN
- Kemudahan pembuatan surat keterangan untuk bisnis
- Pendampingan menuju Net Zero
- Kesempatan promosi
- Update terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis
- Terlibat dalam penyusunan kebijakan industrial
- Potongan harga produk/jasa

Saatnya Level Up dan Maksimalkan Potensi Bisnismu

Daftar segera menjadi anggota Kadin

anggota@kadinindonesia.id

(+62) 85695410875

kadin.id/keanggotaan

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24 dan 29
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950

Direktur Eksekutif Kadin Indonesia: Pipin Moh. Saeful Arifin
Penerbit: Kadin Communication Office | **Penanggung Jawab:** Kepala Kantor Komunikasi Kadin Indonesia, Primus Dorimulu | **Redaktur Pelaksana:** Taufik Zulkarnaen
Redaksi: Arita Gloria, Ari Kristiana K, Bagus Dharmawan, Nurdin, Sabrina Hutajulu, Hariwicahyo Utomo, Fery Hasibuan, Luthfiah Ramadhani S

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp. 021- 527503 | humas@kadin.id

Kadin.Indonesia.Official | kadin_indonesia | kadinindonesiaofficial | kadinindonesia | Kamar Dagang dan Industri Indonesia | kadin.id